

PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026

KECAMATAN BUDURAN









KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Buduran tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen Perencanaan Kecamatan untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 yang memuat Visi Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu : "Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan".

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Buduran tahun 2021-2026 ini juga sebagai amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, juga dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat. Serta diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi terciptanya manajemen Kecamatan Buduran yang berkualitas serta profesional.

Semoga Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Buduran Tahun 2021-2026 dapat menjadi pedoman atau acuan bagi Pejabat Struktural dan Fungsional Umum di Lingkungan Kecamatan Buduran untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan di Kecamatan Buduran.



Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Buduran Tahun 2021-2026 ini masih banyak terdapat kekurangan. Kritik, masukan dan saran masih kami perlukan, mudah-mudahan dapat terus disempurnakan demi tercapainya pembangunan masyarakat khususnya di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Siddano, 28 April 2023

Camat Buduran

KECAMATAN BUDURAN

Drs. SYAMSURIJAL

Pembina Tk. I

NIP. 196609121992031013



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN BUDURAN

JL. H.R.Moch. Mangoendiprojo No. 270 BUDURAN - 61252 Telp. 8921642, Fax 031.862183

Email: <u>buduran@sidoarjokab.go.id</u> Web: www.buduran.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BUDURAN NOMOR: 188/ 15 /438.7.3/2023

TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2023

Menimbang : a.

- a. Sehubungan telah dilakukan penyempurnaan ukuran kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2026, serta Tindak Lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dan Evaluasi Internal yang telah dilakukan, maka perlu dilakukan perubahan/penyempurnaan terhadap Rencana Strategis Tahun 2021 2026 Kecamatan Buduran;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Buduran 2021-2026 ditetapkan dengan Keputusan Camat Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614):
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Informasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
- 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
- 18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SP4D);
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat ;
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 77 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 ;
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD) Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Buduran No: 910/33/438.6.2/2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA Perubahan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan

Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026;

KEDUA : Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Buduran Tahun 2021 – 2026

adalah Dokumen Perencanan Jangka Menengah dengan periode selama 5 (lima) tahun yang akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja); dokumen penganggaran, yaitu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); serta sebagai dokumen pendukung Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Buduran Kabupaten

Sidoarjo.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan

di SIDOARJO

Pada tanggal:

KECAMATAA BUDURAN 16 Januari 2023

CAMAT BUDURAN

DIS SYAMSURIJAL

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660912199203101



IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah Daerah untuk memotivasi timbulnya aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Setiap Perangkat Daerah (PD) mempunyai kewajiban untuk menyusun, mereview serta melakukan perubahan dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan daerah dan Renstra yang telah disusun dapat direview secara berkala.

Penetapan visi dan misi serta usulan program yang tertuang didalam Renstra merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Penyusunan, Review dan Perubahan Rencana Strategis ini disamping bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, juga sebagai upaya sistematis terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.



DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN
KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR BAGAN
DAFTAR GRAFIK

BAB I	PENDAHULUAN				
	1.1	Latar Belakang	1		
	1.2	Landasan Hukum	3		
	1.3	Maksud dan Tujuan	. 11		
	1.4	Sistematika Penulisan	. 12		
BAB II	GAM	IBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUDURAN	. 18		
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Buduran	. 18		
	2.2	Sumber Daya Kecamatan Buduran	. 27		
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Buduran	.35		
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan			
		Kecamatan Buduran	. 50		
	2.5	Keterhubungan dan Kesesuaian Program dan Kegiatan dengar	า		
		Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dalam Dokumen			
		Renstra-PD	. 52		

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN



	BUDU	IRAN 55	
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
		Pelayanan Kecamatan Buduran55	
	3.2	Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil	
		Kepala Daerah Terpilih57	
	3.3	Telaah Renstra Kabupaten Sidoarjo65	
	3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
		Lingkungan Hidup Strategis68	
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis70	
BAB IV	TUJU	AN DAN SASARAN 74	
	4.1	Tujuan dan Sasaran74	
BAB V	STRA	TEGI DAN ARAH KEBIJAKAN76	
D4D \/T	DENIG	ANA DOGODAN DAN KECTATAN CERTA DENDANAAN 70	
BAB VI	RENC	ANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 79	
DAD VIT	VTNE	RJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN113	
DAD VII	KTINE	RJA PENTELENGGARAAN BIDANG URUSAN113	
RAR VIII	PENII	TUP116	
DAD VIII	LITO		
LAMPIDA	N B.I		
LAMPIR/	AIN		
1. Berita A	Acara P	erubahan Renstra	
2. Jadwal	Pelaksa	anaan Perubahan Renstra selama Tahun 2022	
3. Dokum	entasi I	Kegiatan Perubahan Renstra	
4. Form E.73			
5. Form E	.80		



5. Berita Acara Perubahan Renstra PD sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Proporsi Pegawai Kecamatan Buduran Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 2.2	Proporsi Pegawai Kecamatan Buduran Berdasarkan Kedudukan Jabatan Struktural28
Tabel 2.3	Proporsi Pegawai Kecamatan Buduran berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.4	Proporsi Pegawai Dan Kelompok Jabatan Fungsional Pada Kecamatan Buduran
Tabel 2.5	Proporsi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Pada Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo
Tabel 2.6	Proporsi Pegawai Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Golongan30
Tabel 2.7	Sarana dan Prasarana Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo35
Tabel 2.9	Detail Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo42
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Buduran
Tabel 3.2	Pokok-pokok Visi Kabupaten Sidoarjo58
Tabel 3.3	Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-202660



Tabel 3.4	Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 Dengan Tujuan Dan Sasaran Serta Indikator Kinerja Kecamatan	64
Tabel 3.5	Analisis Lingkungan Strategis Kecamatan Buduran	71
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Buduran Tahun 2021-2026	75
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	77
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	82
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Buduran yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	115



DAFTAR BAGAN

Ragan	2 1	Struktur	Organicaci	Kecamatan	Buduran	26
Dayan	Z.I.	Suuktui	Organisasi	Recamatan	Duuulali	∠0



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perkembangan Capaian Kinerja (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat/SKM) Kecamatan Buduran Tahun 2018, 2019,2020 dan 2021	38
Grafik 2.2	Perkembangan Pelayanan IMB Rumah Tinggal Dibawah 400 M² Kecamatan Buduran Tahun 2016-2021	
Grafik 2.3	Jumlah Penduduk yang Mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2016-2021 Kecamatan Buduran	39
Grafik 2.4	Jumlah Penduduk yang Mengurus Kartu Keluarga (KK) Tahun 2016-2021 Kecamatan Buduran	40



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana pembangunan yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang tata cara dan sistematika penyusunannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang



disusun dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Buduran Tahun 2021-2026 dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yaitu sesuai tahapan; a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir dan f. penetapan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Buduran berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

Keterkaitan antara dokumen rencana strategis dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah sebagai berikut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diturunkan dalam target pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) diturunkan dalam rencana kerja tahunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Selanjutnya penyusunan Renstra Kecamatan Buduran tahun 2021-2026 juga merupakan manivestasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu Bapak H. Ahmad Muhdlor, S.I.P., sebagai Bupati dan Bapak H. Subandi, S.H., sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo, yang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Drs. Hj. Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 26 Februari 2021 di Surabaya sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889



Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka Kepmendagri tersebut digunakan sebagai dasar untuk Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Buduran.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Dasar hukum yang gunakan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);



- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 27. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 28. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 29. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 199);

- 31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaannya Rencana Pembangunan Daerah;
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



- 39. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
- 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- 46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang



- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
- 47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
- 48. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
- 49. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- 50. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- 51. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
- 52. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 61);
- 53. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-



2025;

- 54. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
- 56. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- 57. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Buduran Tahun 2019 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);
- 58. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 ;
- 59. Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewajiban Menyusun Rencana Stratigik (RENSTRA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bagi Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- 60. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di



Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);

- 61. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4);
- 62. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- 63. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
- 64. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- 65. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menyelaraskan dengan ukuran kinerja Daerah dalam RPJMD tahun
 2016- 2021;
- Menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan target yang realistis sehingga mampu mengantisipasi perkembangan masa depan;
- c. Membantu pengambilan keputusan untuk memilih secara rasional



- di berbagai kemungkinan, sumber daya yang harus dialokasikan, sejalan dengan tujuan dan sasaran serta hasil yang diharapkan;
- d. Menyusun Program dan Kegiatan 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan potensi dan permasalahan Kecamatan Buduran dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Buduran Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan :

- a. Memberikan acuan penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat RPJMD serta menjabarkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu **Kabupaten Sidoarjo** yang Mandiri, Sejahtera dan Madani melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif;
- Memberikan acuan untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan Kecamatan Buduran;
- c. Memberikan acuan pengelolaan keberhasilan organisasi secara sistematik dan mengembangkan pemikiran, sikap serta tindakan yang berorientasi pada kinerja; dan
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Buduran Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 bab yaitu :



BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat fungsi Renstra Perangkat Daerah, Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat RPJMD, Renstra K/L Daerah dengan dan Renstra provinsi/kabupaten, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Dokumen Renstra

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,



mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Rencana Strategis-PD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Rencana Strategis-PD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada 5 (lima) tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang



mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Rencana Strategis-PD provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

- 3.5.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.5.2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L;
- 3.5.3. Sasaran Jangka Menengah Dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3.5.4. Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Perangkat Daerah;
 Dan
- 3.5.5. Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Perangkat Daerah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah PD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang penutup Rencana Strategis Perangkat Daerah.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUDURAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Buduran

Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buduran Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- 2) Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan;
- 3) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja, susunan organisasi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo terdiri dari:

1. Camat

Camat mempunyai tugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan



masyarakat; mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum; mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; menyelenggarakan kegiatan pelayanan membina administrasi terpadu kecamatan; dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan; melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundangundangan; melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo; melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya Camat berwenang menerbitkan dan menandatangani :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai kewenangannya;
- b. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
- c. Legalisasi Salinan Dokumen Kependudukan;
- d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V);
- e. Rekomendasi penutupan/ penggunaan jalan lokal/ desa;
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
- g. Izin Gangguan (HO) Usaha Mikro;
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro

Berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Nomor : 130/242/438.1.1.1/2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang Pemberhentian Layanan IMB dan TDP Kewenangan Camat, dalam rangka menindaklanjuti



ketentuan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka Per tanggal 4 Januari 2022 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menghentikan sementara layanan pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penerbitan Tanda Daftar Usaha (TDP) yang menjadi kewenangan camat pada Aplikasi SIPRAJA Tipe C dan mengalihkannya ke www.simbg.pu.go.id milik Kementerian PUPR dan untuk Layanan TDP dan IUMK dialihkan layanannya ke www.oss.go.id milik Kementerian Investasi Republik Indonesia.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

2.1 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan



kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan penyusunan perencanaan program;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan termasuk gaji pegawai;
- c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksananya;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor;
- c. Menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan pembinaan kepegawaian;



g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemerintahan. Kepala seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pemerintahan, meliputi:
 - 1. Pengesahan pergantian antar waktu dan pemberhentian karena pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - 2. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa;
 - 3. Pengambilan sumpah dan janji anggota badan permusyawaratan desa;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi kententaram dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kententaram dan ketertiban umum. Kepala seksi kententaram



dan ketertiban umum mempunyai fungsi berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pelaksanaan teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain:
 - 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 2. Penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - 3. Pengawasan dan penertiban usaha (bangunan / reklame liar);
 - 4. Penanganan konflik sosial;
- c. Memproses permohonan Izin Ganguan usaha mikro;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Perekonomian. Sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Perekonomian adalah:

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang perekonomian;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan di bidang perekonomian, meliputi:
 - 1. Pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
 - 2. Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- c. Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 - 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;



- 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Kesejahteraan Sosial. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang urusan kesejahteraan sosial,
 agama dan kemasyarakatan, meliputi:
 - 1. Pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan;
 - 2. Pembinaan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan.
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.



7. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Pembangunan Fisik Kecamatan dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas. Kepala Seksi Pembangunan Fisik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pembangunan dan lingkungan;
- Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan,
 meliputi:
 - 1. Pembinaan penanganan sampah domestik;
 - 2. Pembinaan lembaga dan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup.
- c. Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 - 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) usaha mikro;
 - 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal satu lantai dengan maksimal luasan bangunan 400 M2 (empat ratus meter persegi).
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan serta lingkungan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

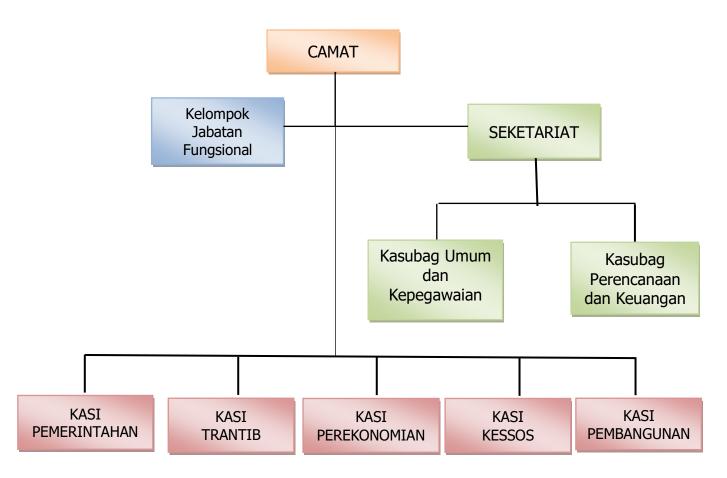
Unsur-unsur di Kecamatan Buduran terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan: Camat;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat Kecamatan terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;



- c. Unsur Pelaksana, Seksi-seksi terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemerintahan;
 - 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 3. Seksi Perekonomian;
 - 4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - 5. Seksi Pembangunan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Buduran





2.2 Sumber Daya Kecamatan Buduran

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan anggaran, sumberdaya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang yang optimal.

Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana, serta pengelolaan anggaran. Adapun kondisi kepegawaian Kecamatan Buduran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Proporsi Pegawai Kecamatan Buduran
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	10	50
2.	Perempuan	10	50
	Jumlah	20	100

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo per 1 Desember 2022 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 20 orang yang terdiri dari 10 orang berjenis kelamin laki-laki dan 10 orang berjenis kelamin perempuan.



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo staf yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan seimbang.

Tabel 2.2
Proporsi Pegawai Kecamatan Buduran
Berdasarkan Kedudukan Jabatan Struktural

No.	Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Eselon IIIb	1	5%
2.	Eselon IVa	2	10%
3.	Eselon IVb	2	10%
4.	Staf	15	75%
	Jumlah	20	100%

Berdasarkan pada tabel di atas, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo berdasarkan kedudukan jabatan didukung oleh 5 orang yang terdiri Eselon IIIb sebanyak 1 orang, eselon IVa sebanyak 2 orang, eselon IVb sebanyak 2 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Jabatan di Kecamatan Buduran masih banyak yang kosong sehingga kinerja dan pelayanan publik tidak bisa maksimal.

Tabel 2.3
Proporsi Pegawai Kecamatan Buduran
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Strata 2	1	5%
2.	Strata 1	6	30%
3.	Diploma III	4	20%



T. SLIA	20	100%
Jumlah	20	100%

Pada tabel di atas, dapat diamati bahwa jumlah pegawai lulusan SLTA sebanyak 9 orang, lulusan Strata 1 sebanyak 6 orang dan lulusan Strata 2 sebanyak 1 orang. Berdasarkan pada total jumlah pegawai sebanyak 20 orang lebih banyak didominasi oleh lulusan SLTA. Kemudian disusul lulusan Strata 1 pada urutan kedua tingkat pendidikan terbanyak di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Hal ini mengindikasikan bahwa sumberdaya manusia di Kecamatan Buduran masih kurang baik, sebab didominasi oleh pegawai yang merupakan lulusan SLTA.

Tabel 2.4
Proporsi Pegawai Kecamatan dan Kelompok Jabatan
Fungsional Pada Kecamatan Buduran

				G	olo	nga	n			Non		JM
No.	Uraian	I	IV		III		II			PNS		וייוכ
		L	Р	L	Р	L	Р	L	P	L	Р	_
1	Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	1	-	1	2	1	3	-		7	2	17
3	Seksi		_	1	1				_			2
	Pemerintahan	-			_		_					
4	Seksi Pemb.	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	2
5	Seksi Kesos	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	3
6	Seksi Trantib	-	-	-	-	2	-	-	-	13	-	15
7	Seksi				1	1	1					3
	Perekonomian	-	-	_	1	T	T	-	-	-	_	3
	Dinas Sektoral											
8	Mantri + PPL	1	-	2	-	1	-	-	-	-	2	6



9	Mantis	-			-					-	-	1
10	Penyuluh KB	2	2 -		1		- - -		-	ı	-	3
	Jumlah	4		13		11		-		24		52

Tabel 2.5
Proporsi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Pada
Kecamatan Buduran

No.	Jenis Pegawai	Jumlah	Prosentase (%)
1.	PNS	20	48 %
2.	Non PNS	22	52 %
	Jumlah	42	100 %

Pada tabel di atas, dapat diamati bahwa jumlah pegawai Non ASN sebanyak 22 orang, sedang ASN sebanyak 20 orang. Berdasarkan pada total jumlah pegawai sebanyak 42 orang lebih banyak didominasi oleh Non ASN.

Tabel 2.6
Proporsi Pegawai Kecamatan Buduran
Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah	Prosentase (%)				
1.	Golongan IV	1	5 %				
2.	Golongan III	11	55 %				
3.	Golongan II	8	40 %				
4.	Golongan I	-	-				
	Jumlah	20	100 %				

Pada tabel di atas, dapat diamati bahwa jumlah pegawai ASN di kecamatan Buduran terdiri dari Golongan I tidak ada,



Golongan II sebanyak 8 orang, Golongan III sebanyak 11 orang. Berdasarkan pada total jumlah pegawai ASN sebanyak 20 orang lebih banyak didominasi oleh Golongan III. Kemudian disusul oleh Golongan II pada urutan kedua terbanyak. Hal ini mengindikasikan bahwa sumberdaya manusia di Kecamatan Buduran masih kekurangan dalam hal jumlah, sebab didominasi oleh Golongan III. Beberapa tabel yang telah diuraikan diatas merupakan kondisi kepegawaian yang menjadi sumber daya aparatur kecamatan Buduran dalam melaksanakan perencanaan dan pembangunan kecamatan selama 5 (lima) tahun mendatang.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kantor Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo memiliki sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana prasarana yang lebih memadai dapat menunjang seluruh aktifitas pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan baik secara kuantitas maupun kwalitas. Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu *output* atau tingkat capaian yang lebih baik. Dengan sarana prasarana menjadi bagian terpenting Kecamatan Buduran karena produk yang dihasilkan adalah berbentuk pelayanan sehingga berdampak pada pelayanan prima kepada masyarakat.

Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Buduran

31



telah tersedia sarana dan prasarana yang telah tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah									
1	2	3	4									
A		BANGUNAN DAN GEDUNG										
1.	1.3.1.01.01.041	Gedung Kantor Kecamatan	1 Unit									
2.	1.3.1.01.01.041	Gedung Dinas Jawatan	1 Unit									
3.	1.3.1.01.01.041	Rumah Dinas Camat	1 Unit									
4.	1.3.1.01.01.041	Gedung Kantor Staf	1 Unit									
5.	1.3.1.01.01.041	Gedung PKK	1 Unit									
6.	1.3.1.01.01.041	Pagar Kecamatan	1 Unit									
7.	1.3.1.01.01.041	Tempat Parkir	1 Unit									
8.	1.3.1.01.01.041	Dapur	1 Unit									
9.	1.3.1.01.01.041	Gedung Rumah Dinas Camat	1 Unit									
В	PERALATAN DAN MESIN											
1.	1.3.2.01.03.042	2 Unit										
2.	1.3.2.02.01.013	Mobil	3 Unit									
3.	1.3.2.02.01.041	Sepeda Motor	3 Unit									
4.	1.3.2.05.01.041	Lemari Besi/Metal	5 Buah									
5.	1.3.2.05.01.042	Lemari Kayu	6 Buah									
6.	1.3.2.05.01.043	Rak Besi	5 Buah									
7.	1.3.2.05.01.045	Filing Cabinet Besi	9 Buah									
8.	1.3.2.05.01.047	Brangkas	1 Buah									
9.	1.3.2.05.01.04.027	Lemari Kaca	3 Buah									
10.	1.3.2.05.01.053	Papan Visual/Papan Nama	2 Buah									
11.	1.3.2.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	2 Buah									
12.	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	2 Buah									
13.	1.3.2.05.01.05.039	Mesin Laminating	2 Buah									
14.	1.3.2.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	1 unit									
15.	1.3.2.05.01.05.068	Fingger Print/Alat Sidik Jari	1 unit									
16.	1.3.2.05.01.05.075	Mesin Antrian	1 unit									
17.	1.3.2.05.01.05.088	Ruang Server/Komputer Pc	1 unit									
18.	1.3.2.05.01.05.088	Pelayanan/Furniture Ruang	1 unit									



Pelayanan Pelayanan				_	
Pelayanan 19. 1.3.2.05.02.012 Meja Kerja Kayu 26 Buah 20. 1.3.2.05.02.016 Bangku Panjang Besi/Metal 4 Buah 21. 1.3.2.05.02.018 Meja Rapat 5 Buah 22. 1.3.2.05.02.01.012 Meja Telepon 1 Buah 23. 1.3.2.05.02.01.013 Meja Podium 1 Buah 24. 1.3.2.05.02.01.014 Meja Resepsionis 1 Buah 25. 1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat 123 Buah 26. 1.3.2.05.02.01.030 Kursi Tamu 6 Set 27. 1.3.2.05.02.01.031 Kursi Putar 19 Buah 28. 1.3.2.05.02.01.039 Meja Komputer 2 Buah 29. 1.3.2.05.02.01.048 Sofa 3 Buah 30. 1.3.2.05.02.01.050 Gazebo 1 Buah 31. 1.3.2.05.02.031 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Buah 32. 1.3.2.05.02.033 Mesin Pemotong Rumput 1 Buah 33. 1.3.2.05.02.034 A.C. Split 24 unit <td< th=""><th>No</th><th>Kode Barang</th><th>Nama Barang</th><th>Ju</th><th>mlah</th></td<>	No	Kode Barang	Nama Barang	Ju	mlah
19. 1.3.2.05.02.012 Meja Kerja Kayu 26 Buah 20. 1.3.2.05.02.016 Bangku Panjang Besi/Metal 4 Buah 21. 1.3.2.05.02.018 Meja Rapat 5 Buah 22. 1.3.2.05.02.01.012 Meja Telepon 1 Buah 23. 1.3.2.05.02.01.013 Meja Podium 1 Buah 24. 1.3.2.05.02.01.014 Meja Resepsionis 1 Buah 25. 1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat 123 Buah 26. 1.3.2.05.02.01.031 Kursi Tamu 6 Set 27. 1.3.2.05.02.01.032 Kursi Putar 19 Buah 28. 1.3.2.05.02.01.039 Meja Komputer 2 Buah 29. 1.3.2.05.02.01.048 Sofa 3 Buah 30. 1.3.2.05.02.01.050 Gazebo 1 Buah 31. 1.3.2.05.02.031 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Buah 32. 1.3.2.05.02.033 Mesin Pemotong Rumput 1 Buah 33. 1.3.2.05.02.046 Kipas Angin 7 Buah 34. 1.3.2.05.02.052 Kom	1	2	-		4
20. 1.3.2.05.02.016 Bangku Panjang Besi/Metal 4 Buah 21. 1.3.2.05.02.018 Meja Rapat 5 Buah 22. 1.3.2.05.02.01.012 Meja Telepon 1 Buah 23. 1.3.2.05.02.01.013 Meja Podium 1 Buah 24. 1.3.2.05.02.01.014 Meja Resepsionis 1 Buah 25. 1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat 123 Buah 26. 1.3.2.05.02.01.031 Kursi Tamu 6 Set 27. 1.3.2.05.02.01.032 Kursi Putar 19 Buah 28. 1.3.2.05.02.01.039 Meja Komputer 2 Buah 30. 1.3.2.05.02.01.050 Gazebo 1 Buah 31. 1.3.2.05.02.01.050 Gazebo 1 Buah 32. 1.3.2.05.02.031 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Buah 33. 1.3.2.05.02.033 Mesin Pemotong Rumput 1 Buah 34. 1.3.2.05.02.0346 Kipas Angin 7					
21. 1.3.2.05.02.018 Meja Rapat 5 Buah 22. 1.3.2.05.02.01.012 Meja Telepon 1 Buah 23. 1.3.2.05.02.01.013 Meja Podium 1 Buah 24. 1.3.2.05.02.01.014 Meja Resepsionis 1 Buah 25. 1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat 123 Buah 26. 1.3.2.05.02.01.031 Kursi Tamu 6 Set 27. 1.3.2.05.02.01.032 Kursi Putar 19 Buah 28. 1.3.2.05.02.01.039 Meja Komputer 2 Buah 30. 1.3.2.05.02.01.048 Sofa 3 Buah 31. 1.3.2.05.02.01.050 Gazebo 1 Buah 31. 1.3.2.05.02.031 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Buah 32. 1.3.2.05.02.033 Mesin Pemotong Rumput 1 Buah 33. 1.3.2.05.02.034 A.C. Split 24 unit 34. 1.3.2.05.02.046 Kipas Angin 7 Buah<				26	
22. 1.3.2.05.02.01.012 Meja Telepon 1 Buah 23. 1.3.2.05.02.01.013 Meja Podium 1 Buah 24. 1.3.2.05.02.01.014 Meja Resepsionis 1 Buah 25. 1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat 123 Buah 26. 1.3.2.05.02.01.031 Kursi Tamu 6 Set 27. 1.3.2.05.02.01.032 Kursi Putar 19 Buah 28. 1.3.2.05.02.01.039 Meja Komputer 2 Buah 30. 1.3.2.05.02.01.048 Sofa 3 Buah 31. 1.3.2.05.02.01.050 Gazebo 1 Buah 31. 1.3.2.05.02.031 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Buah 32. 1.3.2.05.02.033 Mesin Pemotong Rumput 1 Buah 33. 1.3.2.05.02.044 A.C. Split 24 unit 34. 1.3.2.05.02.046 Kipas Angin 7 Buah 35. 1.3.2.05.02.052 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Buah 37. 1.3.2.05.02.0662 Televisi 5					
23. 1.3.2.05.02.01.013 Meja Podium 1 Buah 24. 1.3.2.05.02.01.014 Meja Resepsionis 1 Buah 25. 1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat 123 Buah 26. 1.3.2.05.02.01.031 Kursi Putar 19 Buah 27. 1.3.2.05.02.01.032 Kursi Putar 19 Buah 28. 1.3.2.05.02.01.039 Meja Komputer 2 Buah 30. 1.3.2.05.02.01.048 Sofa 3 Buah 30. 1.3.2.05.02.01.050 Gazebo 1 Buah 31. 1.3.2.05.02.031 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Buah 32. 1.3.2.05.02.033 Mesin Pemotong Rumput 1 Buah 33. 1.3.2.05.02.044 A.C. Split 24 unit 34. 1.3.2.05.02.046 Kipas Angin 7 Buah 35. 1.3.2.05.02.052 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Buah 37. 1.3.2.05.02.066 Televisi 5 Buah 39. 1.3.2.05.02.066.08 Sound System 3					
24. 1.3.2.05.02.01.014 Meja Resepsionis 1 Buah 25. 1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat 123 Buah 26. 1.3.2.05.02.01.031 Kursi Tamu 6 Set 27. 1.3.2.05.02.01.032 Kursi Putar 19 Buah 28. 1.3.2.05.02.01.039 Meja Komputer 2 Buah 29. 1.3.2.05.02.01.048 Sofa 3 Buah 30. 1.3.2.05.02.01.050 Gazebo 1 Buah 31. 1.3.2.05.02.031 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Buah 32. 1.3.2.05.02.033 Mesin Pemotong Rumput 1 Buah 33. 1.3.2.05.02.044 A.C. Split 24 unit 34. 1.3.2.05.02.046 Kipas Angin 7 Buah 35. 1.3.2.05.02.052 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Buah 37. 1.3.2.05.02.050 Televisi 5 Buah 38. 1.3.2.05.02.068 Sound System 3 Buah 40. 1.3.2.05.02.06.036 Tangga Aluminium 2	22.				
25. 1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat 123 Buah 26. 1.3.2.05.02.01.031 Kursi Tamu 6 Set 27. 1.3.2.05.02.01.032 Kursi Putar 19 Buah 28. 1.3.2.05.02.01.039 Meja Komputer 2 Buah 29. 1.3.2.05.02.01.048 Sofa 3 Buah 30. 1.3.2.05.02.01.050 Gazebo 1 Buah 31. 1.3.2.05.02.031 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Buah 32. 1.3.2.05.02.033 Mesin Pemotong Rumput 1 Buah 33. 1.3.2.05.02.044 A.C. Split 24 unit 34. 1.3.2.05.02.046 Kipas Angin 7 Buah 35. 1.3.2.05.02.046 Kipas Angin 7 Buah 36. 1.3.2.05.02.052 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Buah 37. 1.3.2.05.02.060 Televisi 5 Buah 38. 1.3.2.05.02.068 Sound System 3 Buah 40. 1.3.2.05.02.06.014 Microphone 1 Buah	23.	1.3.2.05.02.01.013		1	Buah
26. 1.3.2.05.02.01.031 Kursi Tamu 6 Set 27. 1.3.2.05.02.01.032 Kursi Putar 19 Buah 28. 1.3.2.05.02.01.039 Meja Komputer 2 Buah 29. 1.3.2.05.02.01.048 Sofa 3 Buah 30. 1.3.2.05.02.01.050 Gazebo 1 Buah 31. 1.3.2.05.02.031 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Buah 32. 1.3.2.05.02.033 Mesin Pemotong Rumput 1 Buah 33. 1.3.2.05.02.044 A.C. Split 24 unit 34. 1.3.2.05.02.046 Kipas Angin 7 Buah 35. 1.3.2.05.02.052 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Buah 36. 1.3.2.05.02.052 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Buah 37. 1.3.2.05.02.060 Televisi 5 Buah 38. 1.3.2.05.02.068 Sound System 3 Buah 39. 1.3.2.05.02.06.014 Microphone 1 Buah 40. 1.3.2.05.02.06.018 Unit Power Supply 3 Buah 41. 1.3.2.05.02.06.036 Tangga Aluminium 2 Buah 42. 1.3.2.05.02.06.039					Buah
27. 1.3.2.05.02.01.032 Kursi Putar 19 Buah 28. 1.3.2.05.02.01.039 Meja Komputer 2 Buah 29. 1.3.2.05.02.01.048 Sofa 3 Buah 30. 1.3.2.05.02.01.050 Gazebo 1 Buah 31. 1.3.2.05.02.031 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Buah 32. 1.3.2.05.02.033 Mesin Pemotong Rumput 1 Buah 33. 1.3.2.05.02.044 A.C. Split 24 unit 34. 1.3.2.05.02.046 Kipas Angin 7 Buah 35. 1.3.2.05.02.052 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Buah 36. 1.3.2.05.02.05.015 Rak Piring Alumunium 1 Buah 37. 1.3.2.05.02.0602 Televisi 5 Buah 38. 1.3.2.05.02.068 Sound System 3 Buah 39. 1.3.2.05.02.06.014 Microphone 1 Buah 40. 1.3.2.05.02.06.036 Tangga Aluminium 2 Buah 41. 1.3.2.05.02.06.038 Dispenser 5 Buah 42. 1.3.2.05.02.06.059 Gordyin/Kray 2 Buah 44. 1.3.2.05.03.016 Me	25.	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	123	Buah
28. 1.3.2.05.02.01.039 Meja Komputer 2 Buah 29. 1.3.2.05.02.01.048 Sofa 3 Buah 30. 1.3.2.05.02.01.050 Gazebo 1 Buah 31. 1.3.2.05.02.031 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Buah 32. 1.3.2.05.02.033 Mesin Pemotong Rumput 1 Buah 33. 1.3.2.05.02.044 A.C. Split 24 unit 34. 1.3.2.05.02.046 Kipas Angin 7 Buah 35. 1.3.2.05.02.052 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Buah 36. 1.3.2.05.02.0502 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Buah 37. 1.3.2.05.02.05.015 Rak Piring Alumunium 1 Buah 38. 1.3.2.05.02.062 Televisi 5 Buah 39. 1.3.2.05.02.068 Sound System 3 Buah 40. 1.3.2.05.02.06.014 Microphone 1 Buah 41. 1.3.2.05.02.06.036 Tangga Aluminium 2 Buah 42. 1.3.2.05.02.06.038 Dispenser 5 Buah 43. 1.3.2.05.02.06.059 Gordyin/Kray 2 Buah 44. 1.3.2.05.03.016	26.	1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu	6	Set
29. 1.3.2.05.02.01.048 Sofa 3 Buah 30. 1.3.2.05.02.01.050 Gazebo 1 Buah 31. 1.3.2.05.02.031 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Buah 32. 1.3.2.05.02.033 Mesin Pemotong Rumput 1 Buah 33. 1.3.2.05.02.044 A.C. Split 24 unit 34. 1.3.2.05.02.046 Kipas Angin 7 Buah 35. 1.3.2.05.02.052 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Buah 36. 1.3.2.05.02.050 Rak Piring Alumunium 1 Buah 37. 1.3.2.05.02.062 Televisi 5 Buah 38. 1.3.2.05.02.068 Sound System 3 Buah 39. 1.3.2.05.02.06.014 Microphone 1 Buah 40. 1.3.2.05.02.06.018 Unit Power Supply 3 Buah 41. 1.3.2.05.02.06.036 Tangga Aluminium 2 Buah 42. 1.3.2.05.02.06.039 Gordyin/Kray 2 Buah 43. 1.3.2.05.03.016 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 12 Buah	27.	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	19	Buah
30. 1.3.2.05.02.01.050 Gazebo 1 Buah 31. 1.3.2.05.02.031 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Buah 32. 1.3.2.05.02.033 Mesin Pemotong Rumput 1 Buah 33. 1.3.2.05.02.044 A.C. Split 24 unit 34. 1.3.2.05.02.046 Kipas Angin 7 Buah 35. 1.3.2.05.02.052 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Buah 36. 1.3.2.05.02.05.015 Rak Piring Alumunium 1 Buah 37. 1.3.2.05.02.062 Televisi 5 Buah 38. 1.3.2.05.02.068 Sound System 3 Buah 39. 1.3.2.05.02.06.014 Microphone 1 Buah 40. 1.3.2.05.02.06.018 Unit Power Supply 3 Buah 41. 1.3.2.05.02.06.036 Tangga Aluminium 2 Buah 42. 1.3.2.05.02.06.059 Gordyin/Kray 2 Buah 43. 1.3.2.05.03.016 Meja Kerja Pejabat Eselon IV	28.	1.3.2.05.02.01.039	Meja Komputer	2	Buah
31. 1.3.2.05.02.031 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Buah 32. 1.3.2.05.02.033 Mesin Pemotong Rumput 1 Buah 33. 1.3.2.05.02.044 A.C. Split 24 unit 34. 1.3.2.05.02.046 Kipas Angin 7 Buah 35. 1.3.2.05.02.052 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Buah 36. 1.3.2.05.02.05.015 Rak Piring Alumunium 1 Buah 37. 1.3.2.05.02.062 Televisi 5 Buah 38. 1.3.2.05.02.068 Sound System 3 Buah 39. 1.3.2.05.02.06.014 Microphone 1 Buah 40. 1.3.2.05.02.06.018 Unit Power Supply 3 Buah 41. 1.3.2.05.02.06.036 Tangga Aluminium 2 Buah 42. 1.3.2.05.02.06.038 Dispenser 5 Buah 43. 1.3.2.05.02.06.059 Gordyin/Kray 2 Buah 44. 1.3.2.05.03.016 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 12 Buah	29.	1.3.2.05.02.01.048	Sofa	3	Buah
31. 1.3.2.05.02.031 Cleaner 1 Buah 32. 1.3.2.05.02.033 Mesin Pemotong Rumput 1 Buah 33. 1.3.2.05.02.044 A.C. Split 24 unit 34. 1.3.2.05.02.046 Kipas Angin 7 Buah 35. 1.3.2.05.02.052 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Buah 36. 1.3.2.05.02.05.015 Rak Piring Alumunium 1 Buah 37. 1.3.2.05.02.062 Televisi 5 Buah 38. 1.3.2.05.02.068 Sound System 3 Buah 39. 1.3.2.05.02.06.014 Microphone 1 Buah 40. 1.3.2.05.02.06.018 Unit Power Supply 3 Buah 41. 1.3.2.05.02.06.036 Tangga Aluminium 2 Buah 42. 1.3.2.05.02.06.038 Dispenser 5 Buah 43. 1.3.2.05.03.016 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 12 Buah	30.	1.3.2.05.02.01.050	Gazebo	1	Buah
32. 1.3.2.05.02.033 Mesin Pemotong Rumput 1 Buah 33. 1.3.2.05.02.044 A.C. Split 24 unit 34. 1.3.2.05.02.046 Kipas Angin 7 Buah 35. 1.3.2.05.02.052 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Buah 36. 1.3.2.05.02.05.015 Rak Piring Alumunium 1 Buah 37. 1.3.2.05.02.062 Televisi 5 Buah 38. 1.3.2.05.02.068 Sound System 3 Buah 39. 1.3.2.05.02.06.014 Microphone 1 Buah 40. 1.3.2.05.02.06.018 Unit Power Supply 3 Buah 41. 1.3.2.05.02.06.036 Tangga Aluminium 2 Buah 42. 1.3.2.05.02.06.038 Dispenser 5 Buah 43. 1.3.2.05.02.06.059 Gordyin/Kray 2 Buah 44. 1.3.2.05.03.016 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 12 Buah	31.	1.3.2.05.02.031		1	Ruah
33. 1.3.2.05.02.044 A.C. Split 24 unit 34. 1.3.2.05.02.046 Kipas Angin 7 Buah 35. 1.3.2.05.02.052 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Buah 36. 1.3.2.05.02.05.015 Rak Piring Alumunium 1 Buah 37. 1.3.2.05.02.062 Televisi 5 Buah 38. 1.3.2.05.02.068 Sound System 3 Buah 39. 1.3.2.05.02.06.014 Microphone 1 Buah 40. 1.3.2.05.02.06.018 Unit Power Supply 3 Buah 41. 1.3.2.05.02.06.036 Tangga Aluminium 2 Buah 42. 1.3.2.05.02.06.038 Dispenser 5 Buah 43. 1.3.2.05.02.06.059 Gordyin/Kray 2 Buah 44. 1.3.2.05.03.016 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 12 Buah	32	1 3 2 05 02 033			
34. 1.3.2.05.02.046 Kipas Angin 7 Buah 35. 1.3.2.05.02.052 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Buah 36. 1.3.2.05.02.05.015 Rak Piring Alumunium 1 Buah 37. 1.3.2.05.02.062 Televisi 5 Buah 38. 1.3.2.05.02.068 Sound System 3 Buah 39. 1.3.2.05.02.06.014 Microphone 1 Buah 40. 1.3.2.05.02.06.018 Unit Power Supply 3 Buah 41. 1.3.2.05.02.06.036 Tangga Aluminium 2 Buah 42. 1.3.2.05.02.06.038 Dispenser 5 Buah 43. 1.3.2.05.02.06.059 Gordyin/Kray 2 Buah 44. 1.3.2.05.03.016 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 12 Buah					
35. 1.3.2.05.02.052 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Buah 36. 1.3.2.05.02.05.015 Rak Piring Alumunium 1 Buah 37. 1.3.2.05.02.062 Televisi 5 Buah 38. 1.3.2.05.02.068 Sound System 3 Buah 39. 1.3.2.05.02.06.014 Microphone 1 Buah 40. 1.3.2.05.02.06.018 Unit Power Supply 3 Buah 41. 1.3.2.05.02.06.036 Tangga Aluminium 2 Buah 42. 1.3.2.05.02.06.038 Dispenser 5 Buah 43. 1.3.2.05.02.06.059 Gordyin/Kray 2 Buah 44. 1.3.2.05.03.016 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 12 Buah					
36. 1.3.2.05.02.05.015 Rak Piring Alumunium 1 Buah 37. 1.3.2.05.02.062 Televisi 5 Buah 38. 1.3.2.05.02.068 Sound System 3 Buah 39. 1.3.2.05.02.06.014 Microphone 1 Buah 40. 1.3.2.05.02.06.018 Unit Power Supply 3 Buah 41. 1.3.2.05.02.06.036 Tangga Aluminium 2 Buah 42. 1.3.2.05.02.06.038 Dispenser 5 Buah 43. 1.3.2.05.02.06.059 Gordyin/Kray 2 Buah 44. 1.3.2.05.03.016 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 12 Buah					
37. 1.3.2.05.02.062 Televisi 5 Buah 38. 1.3.2.05.02.068 Sound System 3 Buah 39. 1.3.2.05.02.06.014 Microphone 1 Buah 40. 1.3.2.05.02.06.018 Unit Power Supply 3 Buah 41. 1.3.2.05.02.06.036 Tangga Aluminium 2 Buah 42. 1.3.2.05.02.06.038 Dispenser 5 Buah 43. 1.3.2.05.02.06.059 Gordyin/Kray 2 Buah 44. 1.3.2.05.03.016 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 12 Buah				-+	
38. 1.3.2.05.02.068 Sound System 3 Buah 39. 1.3.2.05.02.06.014 Microphone 1 Buah 40. 1.3.2.05.02.06.018 Unit Power Supply 3 Buah 41. 1.3.2.05.02.06.036 Tangga Aluminium 2 Buah 42. 1.3.2.05.02.06.038 Dispenser 5 Buah 43. 1.3.2.05.02.06.059 Gordyin/Kray 2 Buah 44. 1.3.2.05.03.016 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 12 Buah					
39. 1.3.2.05.02.06.014 Microphone 1 Buah 40. 1.3.2.05.02.06.018 Unit Power Supply 3 Buah 41. 1.3.2.05.02.06.036 Tangga Aluminium 2 Buah 42. 1.3.2.05.02.06.038 Dispenser 5 Buah 43. 1.3.2.05.02.06.059 Gordyin/Kray 2 Buah 44. 1.3.2.05.03.016 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 12 Buah					
40. 1.3.2.05.02.06.018 Unit Power Supply 3 Buah 41. 1.3.2.05.02.06.036 Tangga Aluminium 2 Buah 42. 1.3.2.05.02.06.038 Dispenser 5 Buah 43. 1.3.2.05.02.06.059 Gordyin/Kray 2 Buah 44. 1.3.2.05.03.016 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 12 Buah					
41. 1.3.2.05.02.06.036 Tangga Aluminium 2 Buah 42. 1.3.2.05.02.06.038 Dispenser 5 Buah 43. 1.3.2.05.02.06.059 Gordyin/Kray 2 Buah 44. 1.3.2.05.03.016 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 12 Buah					
42. 1.3.2.05.02.06.038 Dispenser 5 Buah 43. 1.3.2.05.02.06.059 Gordyin/Kray 2 Buah 44. 1.3.2.05.03.016 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 12 Buah					
43. 1.3.2.05.02.06.059 Gordyin/Kray 2 Buah 44. 1.3.2.05.03.016 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 12 Buah					
44. 1.3.2.05.03.016 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 12 Buah					
, , ,					
45. 1.3.2.05.03.035 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2 Buah	45.				
46. 1.3.2.05.03.036 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 6 Buah					
47. 1.3.2.06.01.01.036 Microphone/Wireless Mic 2 unit				-	
48. 1.3.2.06.01.01.041 Professional Sound System 1 unit					
49. 1.3.2.06.01.01.042 Audio Master Control Unit 1 unit					
50. 1.3.2.06.01.01.096 Camera CCTV 1 unit				+	
51. 1.3.2.06.01.01.096 Megaphone Toa 1 unit				-+	
52. 1.3.2.06.01.02.060 Camera Film 1 unit					
53. 1.3.2.06.01.02.105 Layar Film/Projector 1 unit					
54. 1.3.2.06.01.02.126 Camera Digital 3 unit					
55. 1.3.2.06.01.02.164 Infocus 1 unit					
					Channel
57. 1.3.2.07.02.05.025 Hepa Filter 2 unit					



No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah
1	2	3	4
58.	1.3.2.10.01.021	P.C Unit	19 unit
59.	1.3.2.10.01.022	Laptop	7 unit
60.	1.3.2.10.01.023	Note Book	2 unit
61.	1.3.2.10.02.011	Card Reader (Peralatan Mainframe)	1 unit
62.	1.3.2.10.02.01.018	Signatur Pad	1 unit
63.	1.3.2.10.02.029	Iris Scener	1 Buah
64.	1.3.2.10.02.033	Printer (Peralatan Personal Komputer)	23 unit
65.	1.3.2.10.02.034	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3 unit
66.	1.3.2.10.02.037	External	1 unit
67.	1.3.2.10.02.039	Keyboard	1 unit
68.	1.3.2.10.02.03.018	Braket Stand Komputer Dekstop	1 unit
69.	1.3.2.10.02.041	Server	1 unit
70.	1.3.2.10.02.042	Router	1 unit
71.	1.3.2.10.02.04.021	Kabel UTP	1 unit
72.	1.3.2.10.02.04.033	Mikrotik	1 unit
73.	1.3.2.10.02.04.033	TP LINK	1 unit
74.	1.3.2.10.02.051	Ruang Server/NVR	1 unit



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Buduran

Tabel 2.8 (Tabel T.C-23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

	Indikator Kinerja			Target	1	Target R Dae	ENSTRA rah Tah	_	kat		Realisas	si Capaia	ın Tahur	ı ke-		Capaia	n Kinerj Tahun		
No.	sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	-	-	-	82,29	82,30	82,50	82,65	82.75	-	82,32	82,61	85,958	91,462	-	100,02	100,13	104	110,53
2	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%



	Indikator Kinerja			Target	Ţ		ENSTRA rah Tah	_	kat		Realisas	si Capaia	n Tahur	ı ke-		Capaia	n Kinerj Tahun		
No.	sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Lainnya Yang Didelegasikan ke - Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik																		
3	Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran	-	-	-	53%	65%	75%	80%	90%	-	-	13,33%	40%	73%	-	-	17,77%	50%	81,11%



Dari tabel 2.8 dapat dilihat bahwa ada 1 (satu) indikator kinerja Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang targetnya belum terpenuhi 100%, hal ini mempunyai arti bahwa:

- a. Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Buduran pada tahun 2017 target 82,30% realisasi 82,32%. Tahun 2018 target 82,50% realisasi 82,61%. Tahun 2019 target 82,65% realisasi 85,958%. Tahun 2020 target 82,75% realisasi 91,462%, artinya Capaian Kinerja Nilai SKM tercapai selama 4 (empat) tahun berturut-turut, bahkan melebihi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja kecamatan Buduran sangat baik.
- b. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik untuk tahun 2017 target 100% realisasi 100%. Tahun 2018 target 100% realisasi 100%. Tahun 2019 target 100% realisasi 100%. Tahun 2020 target 100% realisasi 100% artinya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja kecamatan Buduran sangat baik.
- c. Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran untuk Tahun 2017 target 65% realisasi 0 (nol). Tahun 2018 target 75% realisasi 13,33%. Tahun 2019 target 80% realisasi 40%. Tahun 2020 target 90% realisasi 73%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja kecamatan Buduran mengalami peningkatan tren positif dari Capaian Kinerja 3 (tiga) tahun terakhir walaupun belum mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja kecamatan Buduran mengalami peningkatan.

Untuk tahun 2016 dan 2017 tidak bisa dihitung capaian kinerjanya karena walaupun sudah ditetapkan targetnya akan tetapi Realisasi tidak terukur. Hal ini disebabkan karena penghitungan persentase desa maju berdasarkan data IDM



(Indeks Desa Maju) yang merupakan kewenangan Dinas/Instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas PMD, bukan pihak Kecamatan Buduran.

Berikut ini hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas capaian kinerja pada pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo selama lima (5) tahun terakhir dan target capaian ditahun terakhir periode Renstra sebelumnya.

Grafik 2.1
Perkembangan Capaian Kinerja (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat /SKM) Kecamatan Buduran Tahun 2018, 2019,2020 dan 2021

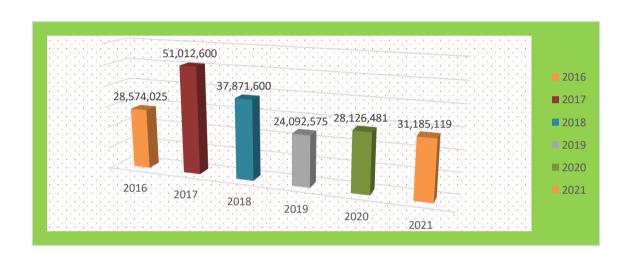


Dari grafik diatas terlihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Buduran tahun 2018, 2019, 2020 dan target 2021 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 realisasi kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah bahkan mencapai 91.46% dari target 82.75%. Pada tahun 2021 realisasi kepuasan masyarakat 91,12% dari target 82,80%.

Dari grafik dibawah terlihat bahwa perkembangan pelayanan IMB Rumah tinggal Kecamatan Buduran 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan di tahun

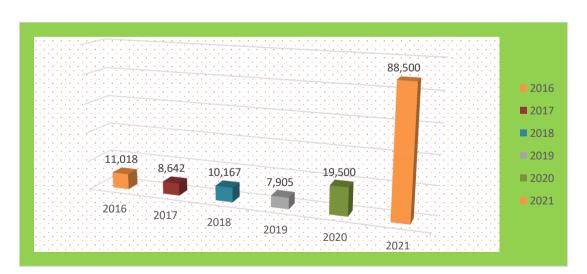
2017 namun mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2019, kemudian mengalami kenaikan kembali di tahun 2020 dan 2021.

Grafik 2.2
Perkembangan Pelayanan IMB Rumah Tinggal Dibawah 400 M²
Kecamatan Buduran Tahun 2016-2021



Grafik 2.3

Jumlah Penduduk yang Mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun
2016-2021 Kecamatan Buduran





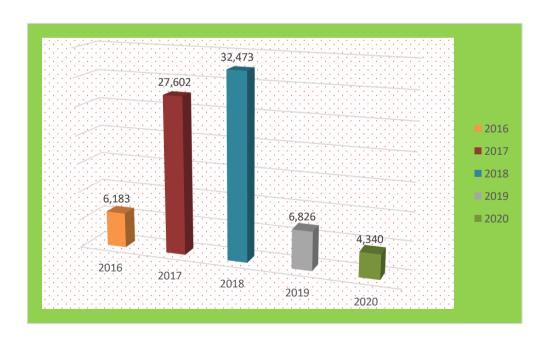
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat kesadaran masyarakat terhadap pengurusan dokumen kependudukan di wilayah Kecamatan Buduran meningkat jauh di tahun 2020 sebesar 19.500 dan tahun 2021 sebesar 88.500 dibandingkan dengan tahun 2016-2019. Pada Grafik 2.3 jumlah masyarakat yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengalami peningkatan yang cukup pesat di tahun 2020 dan tahun 2021.

Pada Grafik 2.4 masyarakat yang mengurus Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Buduran mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 namun mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 6.826 dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2020 sebesar 4.340 dan mengalami lonjakan pada tahun 2021.

Grafik 2.4

Jumlah Penduduk yang Mengurus Kartu Keluarga (KK)

Tahun 2016-2020 Kecamatan Buduran





Bahwa Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja daerah kecamatan Buduran dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami fluktuasi demikian juga Realisasi dan Rasio Capaian.

Berdasarkan tabel 2.9 dibawah ini dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kegiatan yang tidak diselenggarakan rutin setiap tahun sehingga tidak memiliki anggaran per tahun. Selain itu juga masih terdapat beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya belum terlaksana secara maksimal. Juga terdapat beberapa kegiatan yang sudah memiliki anggaran namun tidak dapat direalisasikan secara maksimal. Walaupun pada beberapa kegiatan masih terdapat serapan yang angkanya rendah, namun secara keseluruhan penyerapan anggaran serapan anggaran sudah maksimal, sehingga berdasarkan analisis terhadap anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2018 sampai Tahun 2020, maka kecamatan Buduran sudah melakukan realisasi anggaran secara maksimal.

Pencapaian target Renstra Kecamatan Buduran tahun 2016-2021 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sehingga untuk mengukur pencapaian kinerja dapat dilihat dari anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan dengan detail tabel anggaran dan realisasi keuangan Kecamatan Buduran, sebagai berikut :



Tabel 2.9 (Tabel T.C-24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

Uraian ***)		Angga	aran pada Tahu	n ke-			Realisasi A	Anggaran pada ⁻	Гаhun ke-		Rasio a	ntara Real	isasi dan <i>i</i> ke-	Anggarar	n Tahun	Rata- Pertum (%	buhan
,	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angga ran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan Kecamatan	27,000,000	30,000,000	31,000,000	32,000,000	20,000,000	28,547,025	51,012,600	37,871,600	24,092,575	51,012,600	105.73	170.04	122.17	75.29	255.06	43.18	63.14
Pendapatan dari APBD	27,000,000	30,000,000	31,000,000	32,000,000	20,000,000	28,547,025	51,012,600	37,871,600	24,092,575	51,012,600	105.73	170.04	122.17	75.29	255.06	43.18	63.14
Pendapatan dari Restribusi IMB	27,000,000	30,000,000	31,000,000	32,000,000	20,000,000	28,547,025	51,012,600	37,871,600	24,092,575	51,012,600	105.73	170.04	122.17	75.29	255.06	43.18	63.14
Program pelayanan Administrasi perkantoran	713,757,500	599,026,000	774,514,000	-	-	655,515,025	569,099,728	736,844,911	-	-	91.84	95	95.14	-	-	-28.93	48.07
penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik biaya rekening air, listrik, telpon dalam 1 tahun	124,200,000	114,000,000	153,600,000	-	-	97,812,627	105,358,568	120,283,411	-	-	78.75	92.42	78.31	-	-	-24.49	49.31
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	9,600,000	5,200,000	5,200,000	-	-	3,348,500	4,147,400	3,508,800	-	-	34.88	79.76	67.48	-	-	-48.61	46.32
Penyediaan jasa administrasi keuangan	73460000	60,060,000	60,760,000	-	-	71,710,000	59,894,000	59,535,000	-	-	97.62	99.72	97.98	-	-	-39.03	40.65
Penyediaan jasa kebersihan kantor	118,550,000	121,906,000	145,075,000	-	-	118,550,000	121,885,000	145,075,000	-	-	100	99.98	100	-	-	-26.05	49.30
Penyediaan alat tulis kantor	31,745,000	40,525,000	41,924,000	-	-	31,745,000	37,165,200	41,924,000	-	-	100	91.71	100	-	-	-22.96	51.08
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9,575,000	9,575,000	9,095,000	-	-	8,343,000	9,460,450	8,984,000	-	-	87.13	98.80	98.78	-	-	-35	46.30
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	13,500,000	13,500,000	5,500,000	-	-	7,175,598	13,167,000	5,111,000	-	-	53.15	97.53	92.93	-	-	-53.09	72.93



Uraian ***)		Angga	aran pada Tahu	n ke-			Realisasi	Anggaran pada l	Гаhun ke-		Rasio a	ntara Real	isasi dan <i>i</i> ke-	Anggarar	n Tahun	Rata- Pertum (%	buhan
,	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angga ran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan peralatan rumah tangga	15,200,000	-	-	-	-	13,825,000	-	-	-	-	90.95	-	-	-	-	-100	0
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	4,800,000	4,800,000	4,800,000	•	-	3,949,000	4,303,000	4,703,000	-	-	82.27	89.65	97.98	-	1	-33.33	48.50
Penyediaan bahan logistik kantor	102,960,000	102,960,000	102,960,000	-	-	102,960,000	102,866,210	102,950,000	-	-	100	99.91	99.99	-	ı	-33.33	44.44
Penyediaan makanan dan minuman	46,500,000	46,500,000	30,000,000	-	-	46,500,000	46,440,000	30,000,000	-	-	100	99.87	100	-	-	-45.16	36.55
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	163,667,500	80,000,000	179,350,000	-	-	149,596,300	64,412,900	178,983,700	-	-	91.40	80.52	99.80	-	-	-8.98	113.93
Program peningkatan sarana dan prasarana	487,475,000	371,600,000	314,100,000	-	-	461,809,801	362,466,950	310,818,500	-	-	94.74	97.54	98.96	-	-	-46.41	36.50
Pengadaan Kendaraan dinas operasional	-	-	10,560,000	-	-	-	-	10,230,000	-	-	-	-	96.88	-	-	-100	0
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	-	10,500,000	115,550,000	-	-	-	9,335,000	114,282,000	-	-	-	-	98.90	-	-	-100	0
Pengadaan Meubeleur	9,000,000	70,000,000	23,000,000	-	-	7,175,000	67,170,000	22,650,000	-	-	79.72	95.96	98.48	-	•	170.21	408.58
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	-	15,000,000	89,050,000	-	-	-	14,714,900	88,400,000	-	-	-	98.10	99.27	-	ı	196.83	300.38
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ ops	-	30,000,000	40,000,000	-	-	-	29,813,850	39,990,000	-	-	-	99.38	99.98	-	-	-33.33	67.07
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	-	33,000,000	46,500,000	-	-	-	29,120,200	45,496,500	-	-	-	88.24	97.84	-	-	-29.55	78.12
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	-	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	-	210,600,000	-	-	-	-	209,813,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	6,042,750	5,000,000	-	-	-	5,962,750	4,745,000	-	-	-	98.68	94.90	-	-	-58.63	39.79
Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	4,042,750	3,000,000	-	-	-	4,042,750	2,750,000			-	100	91.67	-	-	-62.90	34.01



Uraian ***)		Angga	aran pada Tahu	ın ke-			Realisasi	Anggaran pada 1	ahun ke-		Rasio a	ntara Real	isasi dan <i>i</i> ke-	Anggarar	Tahun	Rata- Pertum (%	buhan
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angga ran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Laporan Keuangan	-	2,000,000	-	-	-	-	1,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman umum	-	469,200,000		-	-	-	457,426,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan	-	5,000,000	-	-	-	-	4,460,000	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan	1	64,175,000	-	-	-	-	62,821,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/keluarahan	-	17,600,000	-	-	-	-	17,600,000	-	-	-	-	-	-		-	-	-
koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban	1	5,000,000	-	-	-	-	4,995,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban	1	126,250,000	-	-	-	-	125,975,000	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketentraman dan ketertiban	-	85,050,000	-	-	-	-	79,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi perekonomian	-	5,000,000	-	-	-	-	4,955,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi perekonomian	-	15,062,500	-	-	-	-	14,312,500	-	-	-	-	-	-		-	-	-



Uraian ***)		Angga	aran pada Tahu	n ke-			Realisasi	Anggaran pada l	Гаhun ke-		Rasio a	ntara Real	isasi dan <i>i</i> ke-	Anggarar	n Tahun	Pertun	n-rata nbuhan %)
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angga ran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi kesejahteraan sosial	-	5,000,000	-	-	-	-	4,895,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi kesejahteraan sosial	-	15,125,000	-	-	-	-	15,125,000	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
pelaksanaan pawai budaya dan lomba seksi kesejahteraan sosial	1	48,425,000	-	-	-	-	48,025,000	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi Pembangunan fisik	-	24,550,000	-	-	-	-	24,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi Pembangunan fisik	-	52,962,500	-	-	-	-	50,712,500	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	-	7,305,000	-	-	54,425,000	-	7,305,000	-	-	-	-	100	-	-	-100	-
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	-	-	7,305,000	-	-	54425000.0 1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-100	-
Program Penataan Administrasi Kependudukan	-	-	40,827,000	-	-	274,364,500	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-100	-
Peningkatan Pelayana Publik dalam bidang kependudukan	-	-	40,827,000	-	-	274,364,500	-	40,791,000	-	-	-	-	99.91	-	-	-100	0
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usa bagi UMKM	-	-	39,089,000	-	-	99,067,500	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-100	
Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	-	-	39,089,000	-	-	99067500.0 1		39,050,000	-	-	-	-	99.90	-	-	-100	0
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-	-	-	-	91,375,000	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	-	-	-	-	-	91375000.0 1	-	-	-	-	-	-		-	1	-	-



Uraian ***)		Angga	aran pada Tahı	ın ke-			Realisasi	Anggaran pada l	Tahun ke-		Rasio a	ntara Real	isasi dan <i>i</i> ke-	Anggarar	n Tahun	Rata Pertum (%	
·	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angga ran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1	-	131,920,000	-	-	191,557,000	-	131,920,000	-	-	1	-	100	1	-	-100	0
Pengendalian Keamanan Lingkungan	i	-	131,920,000	-	-	191557000	-	-	-	-	•	-	0	•	-	-100	0
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	61,800,000	-	-	65,200,000	-	60,125,000	-	-	-	-	97.29	-	-	-100	0
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	-	-	61,800,000	-	-	65200000.0 1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-100	0
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	6,850,000	-	-	8,768,500	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-100	0
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	-	-	6,850,000	-	-	8768500.01	-	6,850,000	-	-	-	-	100	-	-	-100	0
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	-	-	38,475,000	-	-	27,870,000	-	37,225,000	-	-	-	-	96.75	-	-	-100	0
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat perdesaan	-	-	38,475,000	-	-	27,870,000	-	-	-	-		-	0	-	-	-100	0
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun	-	-	12,150,000	-	-	14,775,000	-	12,150,000	-	-	-	-	100	-	-	-100	0
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	-	-	12,150,000	-	-	14775000.0 1	-		-	-	•	-	0	-	-	-100	0
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa	-	-	11,820,000	-	-	10,753,000	-	11,620,000	-	-	-	-	98.31	-	-	-100	0
Pelatuihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen pemerintah Desa	-	-	11,820,000	-	-	10753000.0 1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-100	0
Program Pelayanan Kesekretariatan	-	-	-	1,265,243,62 0	1,912,857,82 0	-	-	-	1,125,300,45 4	1,709,343,1 60	-	-	-	-	89.36	-	-
Penyediaan barang/jasa perkantoran	-	-	-	701,857,020	858,139,200	-	-	-	595,344,264	711,465,060	-	-	-	-	82.91	-	-



Uraian ***)		Angga	aran pada Tahu	ın ke-			Realisasi A	Anggaran pada	Tahun ke-		Rasio a	ntara Real	isasi dan <i>i</i> ke-	Anggarar	Tahun	Rata Pertum (%	buhan
,	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angga ran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	-	-	-	191,450,000	295,249,070	-	-	-	169,725,000	259,423,750	-	-	-	1	87.87	-	-
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	252,859,200	634,828,000	-	-	-	249,025,000	624,634,350	-	-	-	-	98.39	-	-
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	85,887,600	124,641,550	-	-	-	83,850,000	113,820,000	-	-	-	-	91.32	-	-
Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	-	-	-	28,400,000	-	-	-	-	22,623,390	-	-	-	-	-	•	-	-
Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	-	-	-	932,800	-	-	-	-	932,800	-	-	-	-		-	-	-
Penyusunan laporan keuangan	-	-	-	3,857,000	-	-	-	-	3,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	-	-	•	845,513,400	723,464,930	,	-	-	795,908,077	663,692,831	-	-	-	•	91.74	-	-
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	-	-	1	9,150,000	10,652,000	i	-	ı	8,988,000	8,492,000	-	-	-	ı	79.72	-	-
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan	-	-	-		14,081,200	-		-		12,361,000	-	-	-	-	87.78	-	-
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegjatan Bidang Ketentraman dan	-	-	-	-	2,792,000	-	-	-		0	-	-	-	-	0	-	-



Uraian ***)		Angg	aran pada Tahu	ın ke-			Realisasi	Anggaran pada ി	Гаhun ke-		Rasio a	ntara Real	isasi dan <i>i</i> ke-	Anggaran	Tahun	Rata- Pertum (%	buhan
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angga ran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ketertiban Umum																	
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pembangunan dan Lingkungan	-	-	-	9,307,900	22,255,100	-	-	-	9,307,900	12,003,500	-	-	•		53.94		-
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pemerintahan	-	-	-		14,546,000	-	-	-		1,022,400	-	-	,	•	7.03	•	-
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Perekonomian	-	-	-		5,360,400	-	-	-		5,073,700	-	-	-	-	94.65	•	
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	67,733,700	17,332,000	-	-	-	66,120,000	16,580,000	-	-	-		95.66	-	-
Pelayanan Pemrosesan Permohonan Perizinan IMB Usaha Mikro dan IMB Rumah Tinggal	-	-	-	10,290,000		-	-	-	10,290,000		-	-	•	•		•	-
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Perda dan Perbup, Pengawasan dan Penertiban Usaha, Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	331,301,300	320,837,600	-	-	-	323,631,477	315,506,602	-	-	-	-	98.34	-	-
Pembinaan Lembaga, Kegiatan Lingkungan Hidup dan Penanganan Sampah Domestik	-	-	-	332,998,600	204,510,030	-	-	-	293,677,200	194,941,229	-	-	-	-	95.32	-	-
Pembinaan Perangkat Desa	-	-	-	5,378,500	8,136,000	-	-	-	5,378,500	7,136,000	-	-	-	-	87.71	-	-



Uraian ***)		Angga	aran pada Tahu	ın ke-			Realisasi	Anggaran pada 1	Γahun ke-		Rasio a	ntara Real	isasi dan <i>i</i> ke-	Anggarar	n Tahun	Rata- Pertum (%	buhan
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angga ran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima	-	-	-	39,453,400	46,155,600	-	-	-	39,155,000	44,765,400	-	-	-	-	96.99	-	-
Pembinaan Lembaga dan Kegiatan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan	-	-	-	39,900,000	56,807,000	-	-	-	39,360,000	45,811,000	-	-	-	-	80.64	-	-
Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	-	285,731,250		247,614,800	36,870,800	-	279,502,320	-	244,226,515	36,252,086	-	-	•	-	98.32	•	-
Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum	-	231,893,750		247,614,800	36,870,800	-	227,232,320	-	244,226,515	36,252,086	-	-	•	1	98.32	•	-
sosialisasi penyelenggaraan pelayanan umum	-	7,787,500	-	-	-	-	7,720,000	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
standarisasi pelayanan	-	46,050,000	-	-	-	-	44,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Buduran

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 mempertimbangakan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 di lima (5) tahun ketiga (ke 3). Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Sidoarjo lima (5) tahun ketiga (ke 3) yang tercakup dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Sidoarjo lima tahun ketiga yang tercakup dalam Rencana Strategis Kecamatan Buduran.

Kecamatan Buduran melakukan analisis tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peluang untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya analisa peluang dan tantangan yaitu dapat meliputi penjelasan peluang dan tantangan yang dimiliki oleh Kecamatan Buduran.

2.4.1 Tantangan

- Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan yang tersedia dalam melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan tupoksi;
- Kurangnya akurasi data sebagai database perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Kecamatan;
- 3. Kurang tersedianya juknis dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat;
- 4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur (SOP dan SP) pelayanan administrasi terpadu kecamatan;



- 5. Perbedaan persepsi antara bupati dan camat maupun desa dalam hal pelimpahan kewenangan;
- 6. Belum optimalnya koordinasi antar bidang dalam penyelenggaraan kegiatan kecamatan;
- 7. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam penunjang pelayanan yang diberikan;
- 8. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan kegiatan.

2.4.2 Peluang

- 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang diberikan (Nilai SKM);
- Penerapan dan Pemanfaatan teknologi informasi (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (SIPATEN), Aplikasi SIPRAJA, Web Aplikasi Plavon.sidoarjokab.go.id dan WA Hotline Pelayanan);
- 3. Meningkatnya pengetahuan dan kualitas SDM Aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan Desa serta perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
- Meningkatnya tertib administrasi dan tepat waktunya pemerintahan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan penganggaran (penyusunan APBDes);
- Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang;
- 6. Adanya dukungan dari Bupati Sidoarjo terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan (pelimpahan kewenangan);
- 7. Adanya peningkatkan kualitas SDM Aparatur Kecamatan dan anggaran untuk meningkatkan sarana prasarana dan operasional pelayanan (Bimtek Kepegawaian).



2.5 Keterhubungan dan kesesuaian program dan kegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam dokumen renstra – PD

Kecamatan Buduran mempunyai lima (5) Program yaitu: 1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* yang bertujuan untuk mendukung Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai.

Kecamatan Buduran mempunyai satu (1) Tujuan yaitu : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum dan mempunyai dua (2) Sasaran yaitu : Sasaran 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan Sasaran 2 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum. Untuk Sasaran 1 didukung oleh Program 1, 2, 4 dan 5. Sedang untuk Sasaran 2 didukung oleh Program 3.

Untuk Tujuan Kecamatan Buduran mempunyai Indikator Kinerja Tujuan Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM), dimana merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Buduran. Untuk Sasaran 1 Kecamatan Buduran mempunyai 4 Indikator Kinerja, yaitu Nilai SKM, Nilai SAKIP, Nilai IPP dan Nilai RB. Untuk Sasaran 2 Kecamatan Buduran mempunyai 1 Indikator Kinerja yaitu Prosentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi di Kecamatan.

Untuk menjamin terlaksananya Program serta Kegiatan sehingga bisa menjamin tercapainya Sasaran dan Tujuan, maka Kecamatan Buduran menetapkan SOP Review Renstra dilengkapi dengan Berita Acara Review Renstra serta SK Kepala Perangkat Daerah tentang Review Renstra. Sehingga Review bisa dilakukan secara berkala.



Adapun Alur SOP Review/Perubahan Renstra adalah : 1. Kepala Perangkat Daerah memerintahkan untuk melakukan Review, 2. Pejabat/Staf Perencanaan membuat draft konsep usulan review/perubahan, 3. Pejabat/Staf Perencanaan menghimpun dan menyampaikan usulan/konsep serta masukan, 4. Pejabat/Staf Perencanaan mengadakan rapat pembahasan dan membuat draft menyerahkan kepada Sekretaris Perangkat Daerah dan setelah disetujui disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah, 5. Kepala Perangkat Daerah memeriksa draft usulan review/perubahan, dan 6. Kepala Perangkat Daerah menandatangani/memberi persetujuan pada laporan/hasil Review/Perubahan Renstra.

Hasil Review yang telah dilakukan, antara lain:

Sebelum Review IKU	Setelah Review IKU	Keterangan
1	2	3
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1. Tetap

INDIKATOR KINERJA UTAMA (TUJUAN) 1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

INDIKATOR KINERJA SASARAN:

Sasaran	Indikator	Penjelasan/Fomulasi	Sumber
Strategis	Kinerja	perhitungan	Data
1	2	3	4
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	trantibum yang	Prosentasi Permasalahan trantibum yang diselesaikan / Prosentasi Permasalahan trantibum dalam setahun x 100 %	Laporan



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tambahan	Penjelasan/Fomulasi perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	 Nilai SAKIP Nilai IPP Nilai RB 		Nilai dari Kabupaten
	4. Nilai SKM	4.Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BUDURAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Buduran

Setelah Kecamatan Buduran melakukan Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya analisa keberhasilan dan kegagalan yaitu dapat meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pencapaian kinerja tersebut, serta rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran 2021-2026.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kecamatan Buduran

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan	Ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan dan Ketersediaan SDM Aparatur yang ada belum memadai	 a. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan b. Masih terbatasnya jumlah petugas pelayanan di ruang pelayanan PATEN c. Masih Rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi SDM Aparatur kecamatan sehingga kurang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
2.	Masih kurang optimalnya sosialisasi tentang Penerapan Teknologi Informasi serta SOP dan SP pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Penerapan Teknologi Informasi serta SOP dan SP pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait penerapan teknologi informasi dan prosedur pelayanan administrasi (SOP dan SP) yang telah dipublikasikan
3.	Belum tertib dan tepat waktunya administrasinya pemerintahan desa dalam perencanaan, pelaporan dan penganggaran (penyusunan APBDes)	Ketersediaan SDM Aparatur desa yang ada masih belum memadai dalam segi kuantitas dan kualitas	 a. SDM Aparatur desa masih kurang memahami perencanaan, pelaporan dan penganggaran b. Masih rendahnya akurasi data sebagai database perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan kecamatan
4.	Rendahnya intensitas koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kecamatan	Masih kurang dukungan dan koordinasi dari Dinas/Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan kecamatan	a. Masih kurangnya peran serta dan partisipasi dari semua pihak terkait (Masyarakat, Desa, Kecamatan dan Dinas/ Instansi terkait) dalam pelaksanaan kegiatan kecamatan (misal Musrenbang) b. Juknis dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat belum tersedia

Strategi pembangunan daerah menurut RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 yang dijabarkan melalui Renstra Perangkat Desa Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dengan menetapkan isu permasalahan yang dihadapi dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan



tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Buduran, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan Perangkat Daerah yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Oleh karena itu adanya identifikasi permasalahan tersebut pada tabel diatas juga diharapkan menjadi pedoman dalam penetapan Renja Kecamatan Buduran untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kecamatan Buduran pada membuat Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Renja. Dari Renja Perangkat Daerah terbit DPA Perangkat Daerah yang saling berkaitan satu sama lainya.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan berbasis potensi ekonomi unggulan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis dan partisipatif maka



dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo dimasa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokrastis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan pada uraian di atas, maka cita-cita pembangunan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu H. Ahmad Muhdlor, S.I.P., dan H. Subandi, S.H., sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah; "Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan".

Adapun pokok-pokok bahasan rumusan visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

T abel 3.2 Pokok-pokok Visi Kabupaten Sidoarjo

VISI	POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN	
Terwujudnya	Sidoarjo	Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat	
Kabupaten	Sejahtera	yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, social, politik	
Sidoarjo yang		dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal	
Sejahtera,		ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks	
Maju,		Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya	



VISI	POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN
Berkarakter dan Berkelanjutan		seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (<i>growth</i>) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (<i>equality</i>). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
	Sidoarjo Maju	Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi "menjemput Perubahan". Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna "terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya". Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan dtingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
	Sidoarjo Berkarakter	Sidoarjo Berkarakter merupakan unsur penting dari konsep pembangunan <i>People Centered Develompement</i> atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (<i>value</i>) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
	Pembangun an	Pembangunan yang dilaksanakan diatas prinsip-prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Sidoarjo



VISI	POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN		
	Berkelanjut	sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu		
	an	untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian		
		lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)		
		akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten		
		Sidoarjo.		

Visi diatas selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 sebagai arah pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan keterkaitan antara visi dan misi akan dijabarkan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan	Sidoarjo Sejahtera	Misi 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
Berkelanjutan	Sidoarjo Maju	Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.



VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN		
	Sidoarjo	Misi 4:		
	Berkarakter	Membangun Sumber Daya Manusia Unggul		
		dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses		
		Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan		
		serta Kebutuhan Dasar Lainnya.		
		Misi 5:		
		Mewujudkan Masyarakat Religius yang		
		Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai		
		Keagamaan serta mampu menjaga		
		Kerukunan Sosial Antar Warga.		
	Pembangunan	Misi 3:		
	Berkelanjutan	Membangun Infrastruktur Ekonomi dan		
		Sosial yang Modern dan Berkeadilan		
		dengan memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.		

Dari tabel diatas menunjukkan Visi dan Misi kepala daerah yang akan menjadi arah pembangunan Kabupaten Sidoarjo 5 (lima) tahun yang datang untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo secara umum dan Kecamatan Buduran. Merujuk pada hasil pemetaan Misi berdasarkan pokokpokok Visi di atas, maka dihasilkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi



dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga untuk pengelolaan ketenagakerjaan akan diarahkan pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luasi khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirianfiskal daerah.

Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup



yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan Kabupaten Sidoarjo membutuhkan merata. daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis Gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.

Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.

Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human resources) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan telah membuktikan dunia bahwa nilai-nilai karakter budaya sebagai penempatan prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih



jelas.

Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai kegamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

Tabel 3.4

Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja

Kecamatan

VISI	MISI	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya	Misi 1:	Tujuan :	
Kabupaten	Mewujudkan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas	Nilai SKM
Sidoarjo yang	Pemerintahan yang	Penyelenggaraan	Kecamatan
Sejahtera,	Bersih, Transparan dan	Pemerintahan,	
Maju,	Tangkas Melalui	ketentraman dan	
Berkarakter	Digitalisasi untuk	Ketertiban umum	
dan	Meningkatkan Kualitas		
Berkelanjutan	Pelayanan Publik		
	dan Kemudahan		
	Berusaha.		



	Sasaran 1:	1. Nilai SKM
	Meningkatnya kualitas	Kecamatan
	penyelenggaraan	2. Nilai SAKIP
	pemerintahan	3. Nilai RB
	kecamatan	4. Nilai IPP
Misi 5:	Sasaran 2 :	Prosentase
Mewujudkan Masyarakat	Meningkatnya	Permasalahan
Religiusyang Berpegang	ketentraman dan	Trantibum
Teguh pada Nilai-Nilai	ketertiban umum	yang
Keagamaan serta		diselesaikan
Mampu Menjaga		
Kerukunan Sosial Antar		
Warga.		

3.3 Telaah Renstra Kabupaten Sidoarjo Telaahan Renstra K/L dan Renstra

RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tahapan-tahapan program dan kegiatan pembangunan serta pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan selama periode tersebut. Dokumen perencanaan ini disusun melalui proses yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo menyusun RPJMD, mulai dari tahap persiapan,



penyusunan rancangan awal, rancangan RPJMD, musyawarah perencanaan pembangunan, perumusan rancangan akhir RPJMD, hingga penetapan RPJMD sebagai sebuah Peraturan Daerah. Proses penyusunan RPJMD tersebut melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo perlu dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan yang lebih terinci untuk memudahkan pelaksanaannya. Setiap tahunnya RPJMD perlu dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tiap tahunnya.

RKPD memuat rencana program dan kegiatan pembangunan, pendanaan dan kinerja pembangunan tiap tahun untuk seluruh urusan pemerintahan daerah. Selain itu RPJMD dijabarkan ke dalam rencana strategis (Renstra) setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan rencana pembangunan periode 2021-2026 di urusan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan tiap urusan di setiap tahunnya, dibuat dokumen rencana kerja (Renja) OPD yang mengacu pada program dan kegiatan di Renstra OPD dan menjabarkan OPD di tahun yang bersesuaian.

Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 merupakan benang merah dari Startegi dan Arah Kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kebijakan Umum menggambarkan tentang bagaimana keterkaitan antara Strategi yang telah ditentukan dengan pilihan dan pelaksanaan programnya. Sehingga Gambaran umum memberikan petunjuk operasional mengenai bagaimana Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditentukan akan diimplementasikan melalui berbagai program yang ada dalam RPJMD. Pilihan program unggulan serta program prioritas di masingmasing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat / terstruktur,



maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif sebagai berikut :

- a. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu saja, namun lebih dari itu semua lapisan difasilitasi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan. Pada sisi ini Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta penyediaan kebutuhan/hak dasar masyarakat.
- b. Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan guna mengantisipasi kompleksitas beban kerja kepemerintahan dalam merespon tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat (domestik dan internasional) dengan lebih baik. Arahan ini ditujukan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan lebih fleksibel serta dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparat sipil negara.
- c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan Regulasi (administrasi), pengembangan Skill dan Manajemen Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masyarakat).
- d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan, dilakukan melalui optimalisasi desain Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pendapatan daerah dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatkan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil guna meningkatkan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah,



serta optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan. Kebijakan Belanja daerah dioptimalkan untuk menambah porsi Belanja Langsung, serta secara simultan dilakukan upaya-upaya efisiensi anggaran guna mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Program Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD merupakan instrumen penting dan strategis dalam mewujudkan target pembangunan daerah. Program pembangunan tersebut merupakan acuan bagi seluruh OPD di Kabupaten Sidoarjo untuk menyusun serangkaian kegiatan yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 mempertimbangakan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam Renstra Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 di lima tahun ketiga. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Sidoarjo lima tahun ketiga yang tercakup dalam Rencana Strategis Kecamatan Buduran.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 Pasal 21 ayat 2 menjelaskan Kawasan Wilayah yang berbunyi : Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Sidoarjo meliputi wilayah yang ada di



Kecamatan Waru, Sedati, **Buduran**, Gedangan, Sidoarjo, Candi, Tanggulangin, Jabon, Taman, Krian, Balongbendo, Krembung, Tarik, Prambon, Wonoayu, Sukodono, Porong, dan Tulangan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 juga mempertimbangkan Rencana Tata Ruang yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Buduran Tahun 2019 – 2039.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut bahwa Wilayah Perencanaan Perkotaan Buduran, meliputi :

- a. Desa Entalsewu;
- b. Desa Pagerwojo;
- c. Desa Sidokerto;
- d. Desa Buduran;
- e. Desa Siwalanpanji;
- g. Desa Sidomulyo;
- h. Desa Prasung;
- i. Desa Sawohan;
- j. Desa Damarsi;
- k. Desa Dukuhtengah;
- Desa Banjarsari;
- m. Desa Wadungasih;
- n. Desa Banjarkemantren;
- o. Desa Sukorejo; dan
- p. Desa Sidokepung;

Sedangkan batas-batas Administrasi Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Buduran adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kecamatan Gedangan



b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sidoarjo

c. Sebelah Barat : Kecamatan Sukodono

d. Sebelah Timur : Selat Madura

Sebagai penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah Renstra Kecamatan Buduran berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026, sebagaiman dalam penyusunannya RPJMD juga mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah Jawa Timur dan kabupaten/kota lain yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Pasuruan dan Mojokerto. Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam arahan sistim perkotaan Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian strategis dalam unsur Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Beberapa rencana tata ruang yang menjadi pertimbangan antara lain:

- a. Pengembangan Kasawan Agropolitas di Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Malang dan Bangkalan;
- Pengembangan kawasan industri dan perdagangan di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang dihadapi untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh, oleh karena itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya. Isu Strategis dalam perencanaan strategis OPD Kecamatan Buduran merupakan kondisi actual yang perlu diperhatikan karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang. Issu strategis Kecamatan Buduran dalam lima tahun ke depan dirumuskan berdasarkan fakta permasalahan pelayanan OPD Kecamatan Buduran sebagai berikut :



Tabel 3.5
Analisis Lingkungan Strategis Kecamatan Buduran

	KEKUATAN	KELEMAHAN
	Jumlah SDM Aparatur	Belum memadainya
	kecamatan yang	Kualitas SDM Aparatur
	memadai	Kecamatan
ICH CTRATECIC	Koordinasi bidang	Terbatasnya anggaran
ISU STRATEGIS	berjalan dengan baik	untuk mendukung
		penyelenggaraan
		pelayanan di kecamatan
	Berlakunya peraturan	Belum memadainya SDM
	Bupati No 10 tahun 2017	Aparatur dan Sarana dan
	tentang Perubahan atas	prasarana yang tersedia
	Peraturan Bupati Nomor	Belum optimalnya
	91 Tahun 2016 tentang	koordinasi antar bidang
	Kedudukan, Susunan	Belum optimalnya
	Organisasi, Tugas dan	penggunaan
	Fungsi serta Tata Kerja	electronic governance (e-
	Kecamatan di Kabupaten	government)
	Sidoarjo.	D. I
	Berlakunya Peraturan Bupati	Belum optimalnya
	Sidoarjo Nomor 4 Tahun	pelaksanaan Pelimpahan
	2019 Tentang Pelimpahan	Kewenangan
	Sebagian Kewenangan	
	Bupati Kepada Camat.	
SN .	KEKUATAN	KELEMAHAN
Partisipasi masyarakat	Meningkatkan kualitas	Mendorong efektifitas
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan	pelayanan umum melalui pemanfaatan	penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
pelayariari	meiarar pemamaatan	Keiola pelilerilitarian



	Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan berlakunya perpres tentang pelaksanaan <i>e-government</i> di instansi daerah dan pusat Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (SIPATEN)	melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan sarana prasarana
TANTANGAN	Belum terpenuhinya kompetensi SDM aparatur desa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa Kompleksitas peran SDM aparatur desa dalam implementasi Undang-undang Desa Tuntutan pemenuhan akuntabilitas organisasi pemerintah	KEKUATAN Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemerintahan desa melalui koordinasi, pembinaan dan pengawasan	KELEMAHAN Percepatan pemenuhan akuntabilitas organisasi melalui manajemen sistem informasi laporan kinerja dan keuangan

Berdasarkan pada analisis tersebut, maka dapat dirincikan strategi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu Kecamatan (SIPATEN);
- 2. Mendorong efektifitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan sarana prasarana ;
- 3. Percepatan pemenuhan akuntabilitas organisasi melalui manajemen sistem informasi laporan kinerja (SAKIP) dan keuangan ;
- 4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan



pemerintahan desa melalui koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan alternatif strategi yang telah dibuat maka selanjutnya ditetapkannya strategi yang akan digunakan oleh Kecamatan Buduran kedepannya. Penetapan strategi melalui diselenggarakannya *Focus Grup Discussion* (FGD) dimana hal yang menjadi pertimbangan penetapan strategi adalah isu strategis yang ada, sasaran yang diampu oleh kecamatan, kemampuan SDM dan urgenitas strategis tersebut berdasarkan pertimbangan hasil FGD maka strategi yang digunakan Kecamatan Buduran adalah:

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Melalui Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (SIPATEN); pemanfaatan Perkembangan teknologi dengan pelaksanaan e-government melalui WA Hotline Pelayanan Kecamatan Buduran dan web Aplikasi Plavon.sidoarjokab.go.id Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo serta Aplikasi SIPRAJA Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo;
- 2. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pemerintahan Desa Melalui Koordinasi, Pembinaan Dan Pengawasan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dari Kecamatan Buduran adalah Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang ditunjukkan dengan Indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Buduran.

Sasaran dari Kecamatan Buduran yang ingin dicapai ada 2 (dua) yaitu :

- 1. Sasaran 1 adalah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan ;
- 2. Sasaran 2 adalah Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

 Untuk Sasaran 1 dari Kecamatan Buduran mempunyai 5 (lima)
 indikator sebagai berikut :
- 1. Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan Buduran;
- Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- Meningkatnya Nilai RB;
- 4. Meningkatnya Nilai IPP.

Untuk Sasaran 2 dari Kecamatan Buduran hanya mempunyai 1 (satu) indikator yaitu :

1. Meningkatnya Prosentase Permasalahan Trantibum yang diselesaikan.



Tabel 4.1 (Tabel T.C-25) Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Buduran Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TUJU	_	ET KINI SARAN	ERJA TAHUN	KE-
			TUJUAN/SASARAN	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelengga raan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Buduran	88	88	89	89	90
	Pemerintahan, ketentraman dan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88	88	89	89	90
	Ketertiban umum	n Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Buduran	80 (A)	80.05 (A)	80.1 (A)	80.15 (A)	80.2 (A)
		(Kecamatan)	3. Nilai RB	31.12	31.25	31.35	31.45	32
			4. Nilai IPP	3.51 (B)	3.55 (B)	3.57 (B)	3.60 (B)	3.80 (B)
		2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan Trantibum Yang Diselesaikan	70%	70%	75%	75%	80%



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah/perangkat daerah dalam mengelola setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi juga merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (added value) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap langkah/tahapan berbeda-beda tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah yang diinginkan. Rumusan arah kebijkan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Buduran yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Kecamatan Buduran menetapkan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut :



Tabel 5.1 (Tabel T.C-26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

: Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter Visi RPJMD

dan Berkelanjutan.

Misi 1 RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif,

Partisipatif dan Transparan.

Misi 5 RPJMD: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-

Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar

Warda

V	Varga.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kualitas Penyelengga raan Pemerintahan Kecamatan	 a. Mengupayakan peningkatan kualitas SDM Aparatur Kecamatan agar pelayanan dapat berjalan secara optimal; b. Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan; c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja SDM Aparatur Desa; d. Mengupayakan bimbingan dan pelatihan pada petugas pelayanan; e. Menciptakan suasana kerja yang kondusif 	a. Memberikan Pelayanan terbaik kepada masyarakat; b. Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif; c. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa/ kelurahan serta masyarakat



Moningkatnya	dan kekeluargaan; f. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai; g. Meningkatkan partisipasi dari masyarakat;	1 Moningkatkan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	a. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemerintahan Desa Melalui Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan b. Melaksanakan koordinasi baik internal maupun eksternal yang intensif dengan dinas/instansi terkait	 Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dengan stakeholder Peningkatan pembinaan melalui monitoring, evaluasi dan rapat koordinasi ke desa. Pembinaan Administrasi desa, perencanaan, penganggaran dan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organsasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau semua sumber daya tersebut sebagai masukan *(input)* untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang/jasa.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Buduran ada 5 Program dan Beberapa Kegiatan adalah :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
 - h. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;



- i. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan ;
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat ;
 - d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha ;
- 3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Perda dan Perkada
- 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, Berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Nomor: 130/242/438.1.1.1/2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang Pemberhentian Layanan IMB dan TDP Kewenangan Camat, dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka Per tanggal 4 Januari 2022 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menghentikan sementara layanan pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penerbitan Tanda Daftar Usaha (TDP) yang menjadi kewenangan camat pada Aplikasi SIPRAJA Tipe C dan mengalihkannya ke www.simbg.pu.go.id milik Kementerian PUPR dan untuk



Layanan TDP dan IUMK dialihkan layanannya ke www.oss.go.id milik Kementerian Investasi Republik Indonesia.

Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu progra di Kecam atau kegiatan. Indikator kinerja dapat didefinisikan sebagai uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif OPD Kantor Kecamatan Buduran Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.



Tabel 6.1 (Tabel T.C-27)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

				Indikator	Data				Ta	arget Kin	erja Pr	ogram da	ın Kerai	ngka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahun	2022	Tahun	2023	Tahun	2024	Tahun	2025	Tahu	n 2026	Kin pada peri Ren Pera Dae (20	iode istra ngkat erah	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	l okasi
				_		Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Target	Rp	Target			
Meningka tnya Kualitas Penyelen ggaraan Pemerint ahan, Ketentra man dan Ketertiba n umum	2	3	4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	91.462	82.80	8	88	10	88	12	89	14	89	16	90	18	90	20	Kec. Budura n	Kec. Bud uran
	Meningkatnya kualitas penyelenggara n pemerintahar kecamatan			1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	91.462	82.8		88		88		89		89		90		90		Kec. Bud uran	Kec. Bud uran
				2. Nilai SAKIP Kecamatan	77.84	78.47		80		80.05		80.1		80.15		80.2		80.2		Kec. Bud uran	Kec. Bud uran
				3. Nilai RB	NA	30.37		31.12		31.25		31.35		31.45		32		32		Ke.c Bud uran	Kec. Bud uran
				4. Nilai IPP	NA	31.19		3.51		3.55		3.57		3.60		3.80		3.80		Kec. Bud uran	Kec. Bud uran
																				Kec.	Kec.



				Indikator	Data				Ta	arget Kin	erja Pr	ogram da	an Kera	ngka Pei	ndanaa	n				l luit	
Tujuai PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun	2021	Tahur	n 2022	Tahun	2023	Tahun	2024	Tahun		Tahu	ın 2026	Kir pada per Rei Pera Da (20	ndisi nerja a akhir riode nstra nngkat erah 026)	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
						Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Target		Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				Bud uran	Bud uran
	Meningkatny a ketentram an dan ketertiban umum			Prosentasi Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%			70%		70%		75%		75%		80%				Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	87%		4,93 4,94 2,56 7	88%	5,386 ,783, 689	88%	5,31 3,17 3,48 4.80	88.5%	6,34 9,52 3,34 1.92	88.5%	7,55 9,02 8,01 0.30	89%	9,122, 453,6 12.36	89%	33,73 0,962 ,138. 39	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	a. 4 Buah b. 4 Buah		54,4 11,3 64	a. 4 Buah b. 4 Buah	54,51 1,364	a. 4 Buah b. 4 Buah	64,7 97,7 48.8 0	a. 4 Buah b. 4 Buah	77,7 57,2 98.5 6	a. 4 Buah b. 4 Buah	41,9 58,7 58.2 7	a. 4 Bua h b. 4 Bua h	111,9 70,50 9.93	a. 4 Bua h b. 4 Bua h	350,9 95,67 9.56	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	2 Buah		51,3 50,0 00	2 Buah	51,35 0,000	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran						
				Jumlah						2	61,6	2	73,9	2	37,3	2	106,4	2	279,4	Kec.	Kec.



				Indikator	Data				Ta	arget Kin	eria Pr	ogram da	n Kera	ngka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun	2021	Tahun	2022	Tahun		Tahun		Tahun			n 2026	Kir pada per Rer Pera Da	ndisi nerja nakhir iode nstra ngkat erah 026)	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
				_		Target		Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Target			
1	2	3	4	5 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	7	8	9	10	doku men	20,0 00	dokum en	44,0 00	doku men	82,8 00	doku men	79,36 0	doku men	20 26,16 0	Budu ran	Bud uran
			Koordinasi dan Penyusuna n DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 buah		727, 512	1 buah	727,5 12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD						1 doku men	873, 014. 40	1 dokum en	1,04 7,61 7.28	1 doku men	1,25 7,14 0.74	1 doku men	1,508, 568.8 8	1 doku men	5,413 ,853. 30	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Koordinasi dan Penyusuna n Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA- SKPD yang disusun	2 Buah		727, 512	2 Buah	727,5 12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-						2 doku men	873, 014. 40	2 dokum en	1,04 7,61 7.28	2 doku men	1,25 7,14 0.74	2 doku men	1,508, 568.8 8	2 doku men	5,413 ,853. 30	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Ta	arget Kin	eria Pr	ogram da	n Kerai	ngka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahun	2022	Tahun	2023	Tahun	2024	Tahun	2025	Tahu	n 2026	Kin pada peri Ren Pera Dae (20	aknir iode istra ngkat erah 126)	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
	2	-		-		Target		Target 9	Rp 10	Target	Rp 12	Target	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18	Target 19	Rp 20	21	22
1	2	3	4	SKPD	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	-17	18	19	20	21	22
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja PD yang disusun	1 Buah		1,09 3,10 0	1 Buah	1,193 ,100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1 Lapor an	1,43 1,72 0	1 Lapora n	1,71 8,06 4	1 Lapor an	2,06 1,67 6.80	1 Lapo ran	2,474, 012.1 6	1 Lapo ran	7,685 ,472. 96	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang disusun	4 buah		513, 240	4 buah	513,2 40	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Ta	rget Kin	eria Pr	ogram da	n Kera	naka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahun	2022	Tahun	2023	Tahun	2024	Tahun	2025	Tahu	n 2026	Kin pada per Rer Pera Dae (20	ndisi perja akhir iode nstra ngkat erah	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	l okasi
						Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Target		Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4 lapora n	615, 888	4 Iaporan	739, 065. 60	4 lapora n	886, 878. 72	4 lapor an	1,064, 254.4 6	4 lapor an	3,306 ,086. 78	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	90%		3,77 0,41 3,42 1	90%	3,832 ,840, 248	91%	4,59 9,40 8,29 7.60	91%	5,50 1,10 5,11 7.28	92%	6,60 1,32 6,14 0.74	92%	7,921, 591,3 68.88	92%	28,45 6,271 ,172. 50	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat kan gaji dan tunjangan	12 Bulan		3,77 0,21 1,88 7	276 orang/ tahun	3,820 ,211, 887	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						22 orang/ bulan	4,58 4,25 4,26 4.40	22 orang/b ulan	5,50 1,10 5,11 7.28	22 orang/ bulan	6,60 1,32 6,14 0.74	22 oran g/bul an	7,921, 591,3 68.88	22 oran g/bul an	28,42 8,488 ,778. 30	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Pelaksanaa n Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diterbitkan	178 SPM 12 Bulan					NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan																Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Ta	arget Kin	eria Pr	ogram da	n Kerai	ngka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahur	n 2022	Tahun	2023	Tahun	2024	Tahun	2025	Tahu	ın 2026	Kir pada per Rer Pera Da	iode nstra ngkat erah 026)	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	l okasi
		_		_		Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Target		Target			
1	2	3	4	5 SKPD	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Lapora n		201, 534	1 Lapor an	201,5 34	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Lapor an	241, 840. 80	1 Lapora n	290, 208. 96	1 Lapor an	348, 250. 75	1 Lapo ran	417,9 00.90	1 Lapo ran	1,499 ,735. 41	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	82.75 indeks		239, 921, 391	88	282,4 21,39 1	88	268, 155, 669. 20	89	316, 086, 803. 04	89	372, 654, 163. 65	90	439,5 84,99 6.38	90	1,678 ,903, 023.2 7	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peneranga n Bangunan Kantor	jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	24 Buah		3,29 8,00 7	2 Jenis	3,298 ,007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Paket Komponen Instalasi						2 Paket	3,95 7,60 8.40	2 Paket	4,74 9,13 0.08	2 Paket	5,69 8,95 6.10	2 Pak et	6,838, 747.3 2	2 Pak et	24,54 2,448 .89	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data	paian			Ta	rget Kin	eria Pr	ogram da	n Kera	ngka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun	2025	Tahu	ın 2026	Kin pada per Rer Pera Dad	ndisi erja akhir iode istra ngkat erah	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	l okasi
						Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Target		Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan																	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			12,4 26,8 27	20 jenis	12,42 6,827	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						2 Paket	14,9 12,1 92.4 0	2 Paket	17,8 94,6 30.8 8	2 Paket	21,4 73,5 57.0 6	2 Pak et	25,76 8,268. 47	2 Pak et	92,47 5,475 .80	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Jumlah BBM yang disediakan	15420 Liter		119, 200, 000	15420 Liter	154,2 00,00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						4 Paket	185, 040, 000	4 Paket	222, 048, 000	4 Paket	266, 457, 600	4 Pak et	319,7 49,12 0	4 Pak et	993,2 94,72 0	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	5514 Buah		5,11 7,86 6	8 jenis	5,117 ,866	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan						2 paket	6,14 1,43 9.20	2 paket	7,36 9,72 7.04	2 paket	8,84 3,67 2.45	2 pake t	10,61 2,406. 94	2 pake t	38,08 5,111 .63	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Ta	rget Kin	eria Pr	ogram da	n Kerai	ngka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahun	2022	Tahun	2023	Tahun	2024	Tahun	2025	Tahu	n 2026	Kin pada per Rer Pera Dad	ndisi nerja nakhir iode nstra ngkat erah 026)	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	l okasi
						Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Target	Rp	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	yang Disediakan Jenis buku bahan bacaan, peraturan perundang- undangan dan koran yang tersedia	24 Buah		2,46 0,00 0	2 jenis	2,460 ,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan						24 doku men	2,95 2,00 0	24 dokum en	3,54 2,40 0	24 doku men	4,25 0,88 0	24 doku men	5,101, 056	24 doku men	18,30 6,336	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Penyediaan Bahan/Mate rial	Jenis bahan/material yang tersedia	63 Buah		2,41 8,69 1	25 jenis	2,418 ,691	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan						2 paket	2,90 2,42 9.20	2 paket	3,48 2,91 5.04	2 paket	4,17 9,49 8.05	2 pake t	5,015, 397.6 6	2 pake t	17,99 8,930 .95	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Jenis jamuan yang disediakan b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	422 Kotak		45,0 00,0 00	2 jenis	47,50 0,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						4 lapora n	52,2 50,0 00	4 Iaporan	57,0 00,0 00	4 lapora n	61,7 50,0 00	4 lapor an	66,50 0,000	4 lapor an	285,0 00,00 0	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Ta	arget Kin	eria Pr	ogram da	n Kera	ngka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahun	ı 2022	Tahun	2023	Tahun	2024	Tahun	2025	Tahu	n 2026	Kin pada per Rer Pera Dad	ndisi erja akhir iode istra ngkat erah	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	a. 90%		50,0 00,0 00	a. 85%	55,00 0,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						4 lapora n	66,0 00,0 00	4 laporan	79,2 00,0 00	4 lapora n	95,0 40,0 00	4 lapor an	114,0 48,00 0	4 lapor an	409,2 88,00 0	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis BMD yang diadakan	13 jenis		27,0 00,0 00	2 jenis	33,64 6,750	3 jenis	21,1 76,1 00	4 jenis	25,4 11,3 20	4 jenis	30,4 93,5 84	5 jenis	36,59 2,300. 80	5 jenis	147,3 20,05 4.80	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Pengadaan Mebel	Jenis meubeleur yang diadakan				1 jenis	16,00 0,000		-		-		-		-	1 jenis	16,00 0,000	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							-		-		-		-	1 unit	16,00 0,000	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3 unit	21,1 76,1 00	4 unit	25,4 11,3 20	4 unit	30,4 93,5 84	5 junit	36,59 2,300. 80	5 junit	131,3 20,05 4.80	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Ta	arget Kin	eria Pr	ogram da	n Kera	ngka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahur		Tahur Target		Tahun		Tahun		Tahun	2025		ın 2026	Kin pada per Rer Pera Dad	ndisi erja akhir iode estra ngkat erah (26)	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	l okasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	_	T	Lapangan			•				• •	12			10		•					
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	13 jenis		27,0 00,0 00	2 jenis	17,64 6,750	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Unit Peralatan dan						3 unit	21,1	4 unit	25,4	4 unit	30,4	5 junit	36,59		131,3	Kec.	Kec.
				Mesin Lainnya yang Disediakan							76,1 00		11,3		93,5 84	,	2,300. 80	5 junit	20,05 4.80	Budu ran	Bud uran
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	85%		824, 196, 391	85%	1,096 ,477, 591	85%	288, 235, 669. 20	90%	345, 882, 803. 04	90%	415, 059, 363. 65	95%	498,0 71,23 6.38	95%	2,643 ,726, 663.2 7		Kec. Bud uran
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	3650 Buah		15,196, 391	3650 Buah	30,196 391	. NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4 lapora n	36,2 35,6 69.2 0	4 Iaporan	43,4 82,8 03.0 4	4 lapora n	52,1 79,3 63.6 5	4 lapor an	62,61 5,236. 38	4 lapor an	224,7 09,46 3.27	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 bulan		19,0 00,0 00	12 bulan	210,0 00,00 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Ta	rget Kin	erja Pr	ogram da	n Keraı	ngka Per	ndanaa	n				I In:t	
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahur		Tahun		Tahun		Tahun			n 2026	Kin pada per Rer Pera Dae (20	ngkat erah ()26)	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
						Target		Target	Rp	Target	Rp	Target		Target		Target		Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			dan Listrik																		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						4 Iapora n	252, 000, 000	4 laporan	302, 400, 000	4 lapora n	362, 880, 000	4 lapor an	435,4 56,00 0	4 lapor an	1,562 ,736, 000	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	85%			85%		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						4 Iapora n	-	4 Iaporan		4 lapora n	-	4 lapor an	-	4 lapor an	-	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar b. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	a. 36 Orang b. 36 Orang c. 156 Orang d.		790, 000, 000	a. 36 Orang b. 36 Orang c. 156 Orang d.	856,2 81,20 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Ta	raet Kin	eria Pr	ogram da	n Kerai	ngka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun	2021	Tahur		Tahun	2023	Tahun		Tahun			n 2026	Kin pada per Rer Pera Dad	ndisi nerja nakhir iode nstra ngkat erah 026)	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
						Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Target		Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				c. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar; d. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						4 lapora n	1,02 7,53 7,44 0	4 laporan	1,02 7,53 7,44 0	4 lapora n	1,47 9,65 3,91 3.60	4 lapor an	1,775, 584,6 96.32	4 lapor an	6,372 ,102, 177.9 2	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jang Disediakan Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	120 m2 4 unit 40 unit		19,0 00,0 00	3 jenis	86,50 0,000	4 jenis	71,4 00,0 00	4 jenis	83,2 80,0 00	4 jenis	97,5 36,0 00	5 jenis	114,6 43,20 0	5 jenis	453,3 59,20 0	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak dan Perizinan Kendaraan	a. Jenis kendaraan dinas/operasiona I yang dipelihara; b. Jenis bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang	a. 4 Unit b. 0 Unit c. 4 Unit		3,00 0,00 0	a. 4 Unit b. 0 Unit c. 4 Unit	31,50 0,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Tá	arget Kin	eria Pr	ogram da	n Kera	ngka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahur	n 2022	Tahun	2023	Tahun	2024	Tahun	2025	Tahu	ın 2026	Kin pada per Rer Pera Dad	ndisi nerja nakhir iode nstra ngkat erah	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	l okasi
1	2	3	4	5	6	Target	Rp 8	Target 9	Rp 10	Target 11	Rp 12	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18	Target 19	Rp 20	21	22
	2	3	Dinas Operasional atau Lapangan	tersedia c. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	0		0	9	10		12	13	14	13	10	17	18	19	20	21	22
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						a. 4 Unit b. 0 Unit c. 4 Unit	37,8 00,0 00	a. 4 Unit b. 0 Unit c. 4 Unit	45,3 60,0 00	a. 4 Unit b. 0 Unit c. 4 Unit	54,4 32,0 00	a. 4 Unit b. 0 Unit c. 4 Unit	65,31 8,400	a. 4 Unit b. 0 Unit c. 4 Unit	234,4 10,40 0	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Pemelihara an Mebel	Jenis mebeleur yang dipelihara	1 paket		1,00 0,00 0	2 jenis	12,00 0,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Mebel yang Dipelihara						2 unit	12,0 00,0 00	2 unit	12,0 00,0 00	2 unit	12,0 00,0 00	2 unit	12,00 0,000	2 unit	60,00 0,000	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	28 Unit		15,0 00,0 00	5 jenis	18,00 0,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara						6 unit	21,6 00,0 00	7 unit	25,9 20,0 00	8 unit	31,1 04,0 00	9 unit	37,32 4,800	9 unit	133,9 48,80 0	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Pemelihara an/Rehabilit asi Gedung	Jumlah gedung/kantor/ru mah dinas/jabatan	120 m2		25,0 00,0 00	5 buah	25,00 0,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Ts	arget Kin	oria Pr	ogram da	n Karai	naka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahun	2022	Tahun	2023	Tahun	2024	Tahun	2025		n 2026	Kin pada per Rer Pera Dae (20	ndisi nerja nakhir iode nstra ngkat erah	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
						Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Target		Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kantor dan Bangunan Lainnya	yang dipelihara/rehabil itasi																	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi						5 unit	25,0 00,0 00	5 unit	25,0 00,0 00	5 unit	25,0 00,0 00	5 unit	25,00 0,000	5 unit	125,0 00,00 0	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a. Persentase ASN yang disiplin b. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	a. 85% b. 10%			a. 85% b. 10%	-	a. 85% b. 20%	-	a. 90% b. 30%	-	a. 90% b. 40%	-	a. 95% b. 50%	-	a. 95% b. 50%	-	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Pendataan dan Pengolahan Administras i Kepegawai an	a. Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun b. Jumlah administrasi kepegawaian yang diolah	a. 24 Lapora n b. 24 Lapora n			a. 24 Lapor an b. 24 Lapor an		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Bimbingan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Orang																Kec. Budu ran Kec.	Kec. Bud uran Kec.



				Indikator	Data				Ta	rget Kin	eria Pr	ogram da	n Kerai	ngka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun	2021	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun			n 2026	Kin pada per Rer Pera Dae	ndisi nerja nakhir iode nstra ngkat erah	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
						Target		Target	Rp	Target	Rp	Target		Target		Target	Rp	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Teknis Implementa si Peraturan Perundang- Undangan	yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan																Budu ran	Bud uran
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	a. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi b. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	100%			85%	386,3 45	85%	NA	85%	NA	85%	NA	85%	NA	85%	#VAL UE!	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Pengamana n Barang Milik Daerah SKPD	a. Jumlah BMD SKPD yang telah teregistrasi (jenis) b. Jumlah BMD SKPD yang telah tersertifikasi (jenis)	a. 5 jenis b			a. 5 jenis b		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						1 doku men		1 dokum en		1 doku men		1 doku men		1 doku men	-	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Penatausah aan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	6 Lapora n		386, 345	6 Lapor an	386,3 45	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				T:	arget Kin	eria Pr	ogram da	n Kerai	naka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahur	n 2022	Tahun	2023	Tahun	2024	Tahun	2025	Tahu	ın 2026	Kir pada per Rer Pera Dad	iode istra ngkat erah 026)	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
						Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Target		Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			pada SKPD	(laporan)																	<u> </u>
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						6 Lapor an	463, 614	6 Lapora n	556, 336. 80	6 Lapor an	667, 604. 16	6 Lapo ran	801,1 24.99	6 Lapo ran	2,875 ,024. 95	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
	Meningkatny a ketentraman dan ketertiban umum		PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	a. 100% b. 100 c. 100 d. 100		1,03 2,32 7,75 8	a. 85% b. 85% c. 85%	1,491 ,327, 758	a. 85% b. 85% c. 85%	48,6 82,3 76.4 0	a. 90% b. 90% c. 90%	58,4 18,8 51.6 8	a. 90% b. 90% c. 90%	70,1 02,6 22.0 2	a. 95% b. 95% c. 95%	84,12 3,146. 42	a. 95% b. 95% c. 95%	1,752 ,654, 754.5 2	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Penyelenggara an Urusan	Jumlah Pelayanan	100%		4,56 8,40 0	2000	5,568 ,400	2100	6,68 2,08 0	2200	8,01 8,49 6	2300	9,62 2,19 5.20	2400	11,54 6,634. 24	2400	41,43 7,805 .44	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Та	rget Kin	erja Pr	ogram da	n Keraı	ngka Per	ndanaa	n				Unit	
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun			n 2026	Kir pada per Rer Pera Dad	iode nstra ngkat erah 026)	Kerja Perang	Lokasi
				_		Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Target		0.1	
1	2	3	Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Umum yang ditindaklanjuti (berkas)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	a. Jumlah pelayanan umum yang diterima (berkas) b. Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum (orang)	a. 2500 b. 75 Orang		4,56 8,40 0	a. 2500 b. 75 Orang	5,568 ,400	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						4 lapora n	6,68 2,08 0	4 laporan	8,01 8,49 6	4 lapora n	9,62 2,19 5.20	4 lapor an	11,54 6,634. 24	4 lapor an	41,43 7,805 .44	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Ta	arget Kin	erja Pr	ogram da	ın Kerai	ngka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan		Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahun	2022	Tahun	2023	Tahun	2024	Tahun	2025	Tahu	n 2026	Kin pada per Rer Pera Dae (20	iode istra ngkat erah	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
	2		4	5	6	Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10	Target	Rp 12	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18	Target 19	Rp 20	21	22
1		3	Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun (laporan)	100%	•	122, 046, 616	a. 4 b. 3 c. 12 d. 4	124,0 46,61 6	NA	NA	NA NA	NA	a. 4 b. 3 c. 12 d.4	NA	a. 4 b. 3 c. 12 d.4	NA	a. 4 b. 3 c. 12 d.4	NA NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Koordinasi/ Sinergi Perencanaa n dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintah an dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	a. Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan (kegiatan) b. Jumlah rapat koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan	100%		122, 046, 616	a. 4 b. 3 c. 12 d. 4	124,0 46,61 6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Ta	arget Kin	erja Pr	ogram da	ın Keraı	ngka Per	ndanaa	n				1114	
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahur		Tahun		Tahun		Tahun			n 2026	Kir pada per Rer Pera Da (20	iode nstra ngkat erah 026)	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10	Target 11	Rp 12	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18	Target	Rp 20	21	22
				(kegiatan) c. Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan (kegiatan) d. Jumlah rapat koordinasi bidang perekonomian yang dilaksanakan (kegiatan)		·				•											
				Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						4 Iapora n	135, 000, 000	4 Iaporan	145, 000, 000	4 lapora n	155, 000, 000	4 lapor an	160,0 00,00 0	4 lapor an	719,0 46,61 6	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Ta	raet Kin	eria Pr	ogram da	ın Kera	ngka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun	2021 Rp	Tahur Target	a 2022	Tahun Target		Tahun Target		Tahun Target	2025		ın 2026 Rp	Kir pada per Rer Pera Da	ndisi nerja nakhir iode nstra ngkat erah 026)	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	-		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1) Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan (berkas) 2) Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatar; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun (laporan) 3) Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun (laporan)	100%		905, 712, 742	1. N/A 2. 8 laporan .3 3 laporan	1,361 ,712, 742	1. NA 2. 8 lapora n .3 3 lapora n	42,0 00,2 96.4 0	1. NA 2. 8 laporan .3 3 laporan	50,4 00,3 55.6 8	1. NA 2. 8 lapora n .3 3 lapora n	60,4 80,4 26.8 2	1. NA 2. 8 lapor an .3 3 lapor an	72,57 6,512. 18	1. NA 2. 8 lapor an .3 3 lapor an	1,587 ,170, 333.0 8	Kec. Budu ran	1. Tela h dilim pahk an ke DPM PTS P 2. Kec. Bud uran 3. Kec. Bud uran
			Pelaksanaan Urusan	Jumlah permohonan	100%		6,06 2,78 6	36	7,062 ,786	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Ta	raet Kin	eria Pr	ogram da	n Kera	ngka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahun	ı 2022	Tahun	2023	Tahun	2024	Tahun	2025	Tahu	ın 2026	Kin pada per Rer Pera Dae (20	iode istra ngkat erah 026)	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
	2			5		Target		Target	Rp 10	Target	Rp	Target 13	Rp 14	Target	Rp	Target	Rp 18	Target		- 0.1	
1	2	3	Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 Iantai luasan maksimal 400m2 yang terdaftar (berkas)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	10	19	20	21	1. Tela h dilim pahk an ke DPM PTS
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	sosial, agama dan kemasyarakatan (kegiatan) b. Jumlah monev bidang pembangunan dan lingkungan (kegiatan) c. Jumlah monev bidang pemerintahan (kegiatan) d. Jumlah monev bidang perekonomian (kegiatan)	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100% e.		30,0 00,2 47	a. 2 b. 2 c. 2 d. 2	35,00 0,247	a. 2 b. 2 c. 2 d. 2	NA	a. 2 b. 2 c. 2 d. 2	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran						
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan						4 lapora n	42,0 00,2 96.4	4 laporan	50,4 00,3 55.6	4 lapora n	60,4 80,4 26.8	4 lapor an	72,57 6,512. 18	4 lapor an	260,4 57,83 8.08	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Ta	arget Kin	erja Pr	ogram da	n Kera	ngka Per	ndanaa	n				11	
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahur		Tahun		Tahun		Tahun			n 2026	Kin pada per Rer Pera Dad	ndisi erja akhir iode istra ngkat erah	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				pada Urusan Pemerintahan							0		8		2						
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	a. Jumlah Kegiatan pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domistik yang telah dilaksanakan (kegiatan) b. Jumlah kegiatan pembinaan usaha ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan (kegiatan) c. Jumlah kegiatan pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan (kegiatan)	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100% e. 100%		869, 649, 709	a. 1 kali b. 1 kali c. 1 kali	1,319 ,649, 709	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						4 lapora n	1,58 3,57 9,65 0.80	4 Iaporan	1,90 0,29 5,58 0.96	4 laporan	2,28 0,35 4,69 7.15	4 lapor an	2,736, 425,6 36.58	lapor an	9,820 ,305, 274.4 9	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Ta	rget Kin	eria Pr	ogram da	n Kerai	ngka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahur	n 2022	Tahun	2023	Tahun	2024	Tahun	2025	Tahu	n 2026	Kin pada per Rer Pera Dad	ndisi nerja nakhir iode nstra ngkat erah	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
						Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Target	Rp	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	a. 100 b. 40 c. 100		78,1 78,9 55	70%	81,37 8,955	70%	97,6 54,7 46	75%	117, 185, 695. 20	75%	140, 622, 834. 24	80%	168,7 47,40 1.09	80%	605,5 89,63 1.53	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakata n yang tersusun (laporan)	a. 100% b. 40%		67,9 96,0 44	8	70,99 6,044	8	85,1 95,2 52.8 0	8	102, 234, 303. 36	8	122, 681, 164. 03	8	147,2 17,39 6.84	8	528,3 24,16 1.03	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi sosial di wilayah kecamatan	a. Jumlah kegiatan koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (kegiatan) b. Jumlah kegiatan pembinaan Linmas yang dilaksanakan	100%		44,2 78,3 86	a. 4 b. 2	46,27 8,386	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Ta	arget Kin	eria Pr	ogram da	ın Kera	ngka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahun	2022	Tahun	2023	Tahun	2024	Tahun	2025		ın 2026	Kin pada per Rer Pera Dae	iode istra ngkat erah)26)	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Harmonisas	(kegiatan) Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah kegiatan						1 lapora n	55,5 34,0 63.2 0	1 laporan	66,6 40,8 75.8 4	1 lapora n	79,9 69,0 51.0 1	1 lapor an	95,96 2,861. 21	1 lapor an	344,3 85,23 7.26	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			i Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan (kegiatan)	40%		23,7 17,6 58	4 kegiat an	24,71 7,658	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						4 lapora n	29,6 61,1 89.6 0	4 Iaporan	35,5 93,4 27.5 2	4 lapora n	42,7 12,1 13.0 2	4 lapor an	51,25 4,535. 63	4 lapor an	183,9 38,92 3.77	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan	Jumlah permasalahan pelanggaran	100%		10,1 82,9 11	6	10,38 2,911	6	12,4 59,4 93.2 0	6	14,9 51,3 91.8 4	6	17,9 41,6 70.2 1	6	21,53 0,004. 25	6	77,26 5,470 .50	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Ta	arget Kin	eria Pr	ogram da	n Kera	ngka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahur	n 2022	Tahun	2023	Tahun	2024	Tahun	2025	Tahu	ın 2026	Kin pada per Rer Pera Dad	ndisi nerja nakhir iode nstra ngkat erah 026)	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
	_	<u> </u>		_		Target		Target		Target	Rp	Target	Rp	Target		Target		Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Perda dan Perkada yang difasilitasi (permasalahan)																	
			Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	a. Jumlah operasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan (kegiatan) b. Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang terdaftar (permasalahan) c. Jumlah monev bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (kegiatan)	a. 100% b. 100%		10,1 82,9 11	a. 24 b. 12 c.2	10,38 2,911	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di						1 lapora n	12,4 59,4 93.2 0	1 laporan	14,9 51,3 91.8 4	1 lapora n	17,9 41,6 70.2 1	1 lapor an	21,53 0,004. 25	1 lapor an	77,26 5,470 .50	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahun	2022	Tahun	2023	ogram da Tahun	2024	Tahun	2025	Tahu	n 2026	Kin pada per Rer Pera Dad	iode istra ngkat erah)26)	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	Target	Rp 8	Target	Rp 10	Target 11	Rp 12	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18	Target 19	Rp 20	21	22
	2	3	PROGRAM	Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		I	0	3	10		12	13	14	15	-10	17	10	19	20	21	22
			PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100%		62,2 04,4 79	85%	64,20 4,479	85%	77,0 45,3 75	90%	92,4 54,4 50	90%	110, 945, 340	95%	133,1 34,41 0	95%	477,7 84,05 4	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (kegiatan)	100%		62,2 04,4 79	a. 3 Kegiat an	64,20 4,479	a. 3 Kegiat an	77,0 45,3 75	a. 3 Kegiata n	92,4 54,4 50	a. 3 Kegiat an	110, 945, 340	a. 3 Kegi atan	133,1 34,41 0	6220 4479 00%	477,7 84,05 4	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Ta	rget Kin	erja Pr	ogram da	n Kera	ngka Pen	danaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun	2021	Tahun	2022	Tahun	2023	Tahun	2024	Tahun	2025	Tahu	n 2026	Kin pada per Rer Pera Dad	akıııı	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	
_						Target		Target	Rp	Target	Rp	Target		Target		Target	Rp 18	Target			
1	2	3	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan	lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional (kegiatan)	a. 1 Kali		62,2 04,4 79	a. 3 Kegiat an	64,20 4,479	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	NA	NA NA	NA NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Ta	arget Kin	erja Pr	ogram da	n Kera	ngka Per	ndanaa	n				1114	
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahu	n 2026	Kir pada per Rei Pera Da (20	ndisi nerja n akhir riode nstra ingkat erah 026)	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
						Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Target		Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						250 orang	77,0 45,3 75	250 orang	92,4 54,4 50	250 orang	110, 945, 340	250 oran g	133,1 34,41 0	250 oran g	477,7 84,05 4	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Pelaksanaa n Tugas Forum	Jumlah kegiatan FORKOPIMKA yang	1 kali			4 kegiat an		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Ta	arget Kin	eria Pr	ogram da	n Kerai	ngka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahun		Tahun	2023	Tahun	2024	Tahun	2025		n 2026	Kin pada per Rer Pera Dae (20	ndisi nerja nakhir iode nstra ngkat erah	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokaci
						Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Target	Rp	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dilaksanakan (kegiatan)																	
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						1 lapora n		1 laporan		1 lapora n		1 lapor an		1 lapor an	-	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Pengembang an Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pilkada, pileg, pilpres (desa)				2 kali (Prasung, Banjar kemantre n)		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila						4 lemba ga	8,47 5,34 3.20	4 lembag a	10,1 70,4 11.8 4	4 lemba ga	12,2 04,4 94.2 1	4 lemb aga	14,64 5,393. 05	4 lemb aga	45,49 5,642 .30	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase	100%		98,9 08,5 45	100%	103,9 63,54 5	100%	126, 983, 672	100%	154, 050, 971	100%	185, 974, 874	100 %	223,7 26,70 3	100 %	794,6 99,76 5	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



				Indikator	Data				Ta	raet Kin	eria Pr	ogram da	n Kera	ngka Per	ndanaa	n					
Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahur	2022	Tahun	2023	Tahun	2024	Tahun	2025	Tahu	ın 2026	Kir pada per Rer Pera Da	iode nstra ngkat erah 026)	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
		<u> </u>				Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Target		Target			
1	2	3	4	sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%		98,9 08,5 45	15	103,9 63,54 5	15	126, 983, 672	15	154, 050, 971	15	185, 974, 874	15	223,7 26,70 3	15	893,6 08,31 0	Kec. Budu ran	Kec. Budu ran
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahar Desa	a. Jumlah APBDes yang telah dievaluasi b. Jumlah APBDes perubahan yang telah dievaluasi	a.100 % b. 100 %		2,72 9,27 3	a. 15 b. 15	2,784 ,273	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa						15 doku men	5,56 8,54 6	15 dokum en	8,35 2,81 9	15 doku men	11,1 37,0 92	15 doku men	13,92 1,365	15 doku men	41,76 4,095	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat	Jumlah kegiatan pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan	100%		96,1 79,2 72	1 X	101,1 79,27 2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



Tujuan PD	Sasaran PD	K o d e	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegi atan (intermediate output)/subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Tahun		Tahun	2022	Tahun	2023	ogram da Tahun	2024	Tahun	2025	Tahu	n 2026	Kin pada per Rer Pera Dad	iode istra ngkat erah 126)	Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	Target	Rp 8	Target 9	Rp 10	Target 11	Rp 12	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18	Target 19	Rp 20	21	22
	-		Desa	yang dilaksanakan Jumlah Dokumen																	
				Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						1 doku men	121, 415, 126	1 dokum en	145, 698, 152	1 doku men	174, 837, 782	1 doku men	209,8 05,33 8	1 doku men	752,9 35,67 0	Kec. Budu ran	Kec. Bud uran
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						1 doku men		1 dokum en		1 doku men		1 doku men		1 doku men		Kec. Budu ran	Kec. Bud uran



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Buduran

Indikator Kinerja pembangunan daerah merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau dapat dikatakan indikator kinerja merupakan suatu alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sedangkan elemen kinerja meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam suatu unit kerja. Penentuan indikator kinerja serta pengukuran capaiannya ditetapkan dengan merujuk kepada strategi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Indikator Kinerja juga sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun Hasil Perubahan/Review yang telah dilakukan oleh Kecamatan Buduran adalah :

INDIKATOR

KINERJA UTAMA (TUJUAN) 1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Sebelum Review IKU	Setelah Review IKU	Keterangan
1	2	3
Nilai Survey Kepuasan	Nilai Survey Kepuasan	Tetap
Masyarakat (SKM) Pelayanan	Masyarakat (SKM)	-
Administrasi Terpadu	Pelayanan Administrasi	
Kecamatan	Terpadu Kecamatan	

Untuk Indikator Kinerja Sasaran ada perubahan/penambahan sebagai berikut:



INDIKATOR KINERJA SASARAN

Sasaran 1:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Fomulasi perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4
Ketentraman dan	Permasalahan trantibum yang	Prosentasi Permasalahan trantibum yang diselesaikan / Prosentasi Permasalahan trantibum dalam setahun x 100 %	Laporan

Sasaran 2:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tambahan	Penjelasan/Fomulasi perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	 Nilai SAKIP Nilai IPP Nilai RB Nilai SKM 	 Nilai SAKIP Kecamatan dalam setahun Nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Nilai RB (Reformasi Birokrasi) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 	Nilai dari Kabupaten

Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Buduran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Buduran yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

		Kondisi		Target Ca	paian Seti	ap Tahun		Kondisi
No	Indikator Tujuan dan Sasaran	kinerja pada awal periode RPJMD	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	kinerja pada akhir RPJMD
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	91.46	88	88	89	89	90	90
2	Nilai SAKIP Kecamatan	77.84 (BB)	80 (A)	80.05 (A)	80.10 (A)	80.15 (A)	80.20 (A)	80.20 (A)
3	Nilai RB	NA	31.12	31.25	31.35	31.45	32	32
4	Nilai IPP	NA	3.51 (B)	3.55 (B)	3.57 (B)	3.60 (B)	3.80 (B)	3.80 (B)
5	Persentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi Kecamatan	NA	70	70	75	75	80	80



BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Buduran Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan, erat kaitannya dengan proses menetapkan arah dan kebijakan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; bagaimana mencapainya; langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis juga berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menjadi dasar Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis berpedoman

pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

Selanjutnya Perubahan Renstra dijadikan pedoman bagi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2021-2026 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buduran.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

Sidoario, 28 April 2023

Pembina Tk. I

NIP. 196609121992031013

SYAMSURIJAL



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN BUDURAN

JL. H.R.Moch. Mangoendiprojo No. 270 BUDURAN - 61252 Telp. 8921642, Fax 031.8962183

Email: buduran@sidoarjokab.go.id Web:

www.buduran.sidoarjokab.go.id

BERITA ACARA HASIL PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

Nomor: 050/01/438.7.3/2023

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun 2023, kami Tim Penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat Buduran Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/14/438.7.3/2023 tanggal 09 Januari 2023 telah melaksanakan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan rincian hasil sebagai berikut:

I. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN BUDURAN

a. Uraian Tujuan dan Indikator Sebelum Reviu/Perubahan

Tujuan (Sebelum Perubahan)	Tujuan (Setelah Perubahan)	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tetap
Indikator : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Indikator : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Tetap

Sasaran: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Indikator Kinerja: 1. Nilai SAKIP Kecamatan	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Indikator Kinerja : 1. Nilai SAKIP Kecamatan	Tetap
Prosentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi di Kecamatan	Prosentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi di Kecamatan	
Recamatan	Indikator Kinerja : 1. Nilai RB 2. Nilai IPP 3. Nilai SKM	Tambahan Indikator Kinerja Sasaran Baru

1. FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian Formulasi IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Cara Pengukuran	Definisi Operasional
(1)	(2)	(3)
Indikator Kinerja Tujuan : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapai dan kebutuhannya.
Indikator Kinerja Sasaran : 1. Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan dari Inspektorat	1. Nilai SAKIP Kecamatan adalah skor capaian dari rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporar kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi

Indikator Kinerja Iujuan dan Sasaran	Cara Pengukuran	Definisi Operasional
(1)	(2)	(3)
		pemerintah
2. Prosentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi di Kecamatan	Jumlah Permasalahan Trantibum yang difasilitasi / Jumlah Permasalahan Trantibum yang diterima	Permasalahan Trantibum yang difasilitasi di Kecamatan
3. Nilai RB	Nilai RB dari Bagian Organisasi dan Inspektorat	3. Nilai Reformasi Birokrasi adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar 132 komponen, mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga nilai persepsi korupsi yang melibatkan survei
4. Nilai IPP	4. Nilai IPP dari Bagian Organisasi	eksternal. 4. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan
5. Nilai SKM	5. Nilai SKM dari Bagian Organisasi	Pengaduan serta Aspek Inovasi. 5. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah nilai dari kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhada kualitas layanan yang diberika oleh penyelenggara pelayanar publik

2. TARGET KINERJA

a. Rincian Target Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Perubahan

INDIKATOR	SATU	KONDISI	TARG	ET KIN	ERJA P	ADA TA	HUN	KONDISI AKHIR RENSTRA
KINERJA SASARAN	AN	RENSTRA (2021)	2022	2023	2024	2025	2026	(2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nilai SAKIP Kecamatan	Poin		80	80.05	80.1	80.15	80.2	80.2
Prosentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi di Kecamatan	%	100%	70%	70%	75%	75%	80 %	80 %

 b. Rincian Target Indikator Kinerja Sasaran Setelah Perubahan (Jika ada perubahan target sasaran Renstra OPD)

INDIKATOR	SATU	KONDISI AWAL	TARGI	ET KINE	RJA PA	DA TAI	HUN	KONDISI AKHIR RENSTR
KINERJA	AN	RENSTRA (2021)	2022	2023	2024	2025	2026	A (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nilai SAKIP	Poin	78.47	80	80.05	80.1	80.15	80.2	80.2
Kecamatan Prosentase	Prosen	100%	70%	70%	75%	75%	80%	80%
Permasalahan Trantibum	tase							
yang difasilitasi di		9 * 1						
Kecamatan	Poin	30.37	31.12	31.25	31.35	31.45	32	32
Nilai RB	FOIL	30.07	0					
Nilai IPP	Poin	31.19	3.51	3.55	3.57	3.60	3.80	3.80
Nilai SKM	Poin	82.8	88	88	89	89	90	90

 Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 masih dapat digunakan/relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen RKA-SKPD.

Demikian kesimpulan hasil Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Kecamatan Buduran di Tahun 2023 ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO

Dr. HERI SOESANTO, SH., MH.

Pembina Utama Muda NIP. 19680519 198803 1 002 Sidoarjo, og Januari 2023

18

Drs. SYAMSURIJAL

KECAMATAN PARMAN

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196609121992031013

BERITA ACARA

VERIFIKASI RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan Verifikasi Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Kecamatan Buduran dengan melibatkan Mitra Bappeda dan Verifikator Kabupaten Sidoarjo dengan hasil verifikasi sebagai berikut :

				-	r			
Ĭ	(1) Pencapaian Kinerja Pelayanan PD	Tabel T-C 23 (Hal. 200)	>					
	(Interpretasi/analisis tabel) (2) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	Tabel T-C 24 (Hal. 200)	>					
-	PD (Interpretasi/analisis tabel)				r			
2.4	Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan		;					
	PD (Terkait Macam pelayanan; Perkiraan		>					
	kebutuhan pelayanan; Aranan lokasi				\dagger			_
1	pengembangan pelayanan ya dibarata K/l				†			_
1	(1) Hasil analisis temadap Neristra IV.				†			_
	(2) Hasil analisis ternadap heristia i Dirigina		_		_			_
	(3) Hasil analisis terhadap telaanan dokumen				†			_
1	RIKW				1			_
	(4) Hasil analisis ternadap nunc							-
2.5	2.5 Kerja Sama Daerah (Opsional jika ada)				>			
28	Katarhubungan dan kesesuaian program dan							_
	kenjatan dengan tujuan dan sasaran perangkat							_
	daerah dalam dokumen renstra - PD		+		,			_
I	Washall Comboran Palayanan Perangkat				>			_
	(1) pada bab II Gallibaral I Graydinan		4		†	,	a SOP Reviu Perubahan	_
	Daeran [C.4]					>	Donotto holim ada	-
	(2) pada bab II, temukan data pendukung seliah						sehingga Reviu belum	
	Indikator yang dapat diamat paga saga saga						dilakukan secara berkala	_
							 b. Data pendukung kualitas 	_
							IKU (Definisi Operasional)	_
							untuk dilengkapi dan diselaraskan	
			4		†			
≡	BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN		>					T
	TUGAS & FUNGSI	T-L-1 T D 25 (Hal 129)	+				Tabel disesuaikan dengan	
3.1		- Iai		>	1		format abel 1-6.35	T
ľ	Fungsi Pelayanan PD		>					
3.2			+		Ť			
33	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Rentra PD Provinsi		>					\neg
5	terkait		+		T			
	(1) Faktor penghambat & pendorong terkait		_		1			\top
	Renstra K/L		_					
	Renstra PD Provinsi		+		T			
8	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian		>					\neg
	Lingkungari nilup Suakagis							

										Tabel 4.1 mohon tahun	dijelaskan tahun berapa? 2016 s/d 2020	persentase permasalahan trantibum yang difasilitasi	diganti menjadi yang diselesaikan				
		>		>	>	>		>		>	Таbel.Т-С 25 (Наl. 202)	>		>	Tabel.T-C 26 (Hal. 203) v		
MOTOR	(1) Faktor penghambat & pendorong terkait RTRVV	(2) Faktor penghambat & pendorong terkait KLHS	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	(1) Review kembali faktor yg mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari: Gambaran pelayanan PD; Sasaran renstra K/L; Sasaran renstra PD Provinsi; Implikasi RTRW;	Implikasi KLHS	(2) Menjelaskan metode penentuan isu-isu	(3) Menampilkan hasil penentuan isu-isu tersebut	(4) Memperoleh informasi tentang apa saja isu stratedis vang akan ditangani melalui Renstra PD	tahun rencana		4.1 Tujuan dan Sasaran jangka menengah PD : Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka	menengah PD		NAVALI OTO TAKAN	V STRATEGIDAN AKAH KEDIJANAN	Strategi dan Kebijakan PD	

	ALL STREET, ST	Tehel T-C 27 (Hal. 204)			1. PROGRAM	7
5	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTA	(101)			PENTELENGGARAN	, z
	PENDAMAAN				PELAYANAN PUBLIK,	
					KegiatanPelaksanaan	
					Urusan Pemerintahan yang	yang
					Terkait dengan Pelayanan	anan
					Perizinan Non Usaha,	_
		3			Kegiatan "Pelaksanaan	- LE
		>			Urusan Pemerintahan yang	yang ı
					Terkait dengan Non	
					Perizinan" Telah	
					dilimpahkan ke DPMPTSP	TSP
					2. Penulisan target SAKIP	AKIP,
			-		RB mohon di tulis huruf	Jn
					beserta angka / A (90)	<u> </u>
				>	Dokumen Reviu Perubahan	pahan
4	Konsistensi dan keterhubungan antara dokumen				Renstra belum dilengkapi	kapi
			_		dengan:	
					a. Berita Acara Perubahan	ahan
					b. Informasi kondisi	
					sebelum dan sesudah	_
					c. Jadwal pelaksanaan	an .
					Reviu selama tahun 2022	2022
					d. Dokumentasi kegiatan	atan
					Perubahan Renstra	
			>			
	(1) BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta					
	Pendanaan Kenstra-FU dengan Day vii Nordigeri					
	Pendahaan pembangunan dan program pengahan					
	Uaeran (Kr.JWD) ID: II		>			
	indikator, target kinerja program, pagu program,					
_	dan perangkat daerah penanggungjawab program					
	dengan Bab VII Pada RPJMD [B.2]		>			
6.2	-					
_	Pencapaian Program Pembangunan Daeran					
	RPJMD					

		Mohon disesuaikan,	Operasional dan Formulasi perhitungan pada tabel Indikator Sasaran dan Indikator Tujuan		
> >	> >			>	>
	+	-	>		
		Tabel.T-C 27 (Hal. 205)			
(1) Bab VI Renstra-PD KESESUAIAN NAMA KEGIATAN, INDIKATOR, DAN TARGET dengan Bab VI RPJMD apakah telah mendukungt pencapaian target program pembangunan [B2.1.2] 6.3 Keterhubungan dan kesesuaian program dan	kegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam dokumen renstra - PD (1) Pada Bab VI Rencana Program dan kegiatan pendanaan [C.4]	(2) Perhatikan Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan pendanaan indikatif [C.5]		7.1 Keterhubungan dan kesesuaian program dan kegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat	daerah dalam dokumen renstra - PU (1) Pada Bab VII Kinerja penyelenggaraan bidang urusan renstra - PD [C.5]

Keterangan:
Seharusnya dilakukan oleh semua PD
Dilakukan oleh PD tertentu yang terkait urusannya

Demikian kesimpulan hasil Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Buduran untuk dapat dipergunakan sebagai masukan dalam Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026

Menyepakati:

E	İ	DEBANCKAT DAFRAH	NAMA	Tanda Tangan
2	, L	BAPPEDA (MITRA BAPPEDA)	Hemita Hadi Lestari	2
	2	BAPPEDA (RENDALEV)	Ifadhotun Nikmah	2
	ო	INSPEKTORAT	I Vera Siadina S.STP, M.Si	3
	2	BAGIAN ADMINISTRASI	Bastariyah Oktaviana	3
	ω	KECAMATAN BUDURAN	Listijo Prihatini Susanti, SE.	



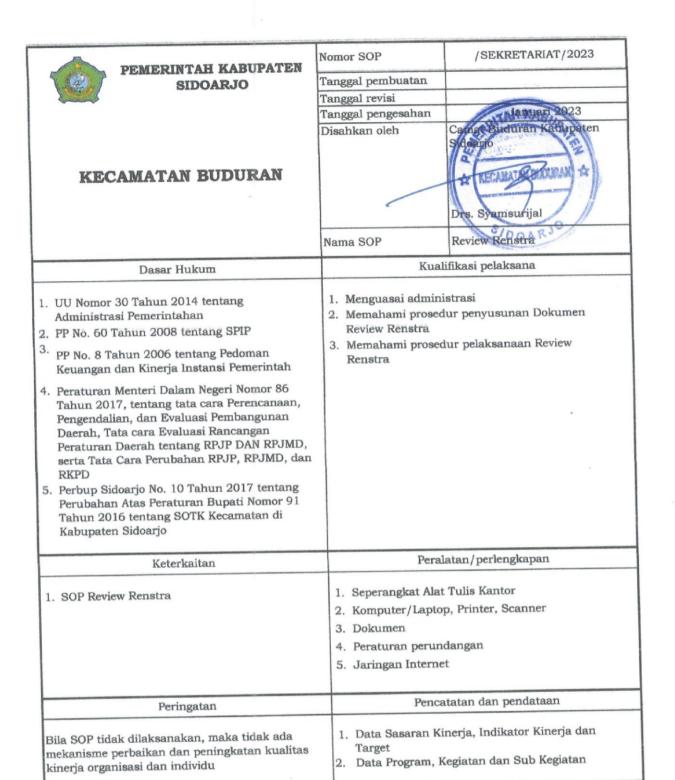
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REVIEW RENSTRA

KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

Jalan H.R. Moch. Mangoendiprojo No. 270 Telp. (031) 8921642 E-mail : buduran@sidoarjokab.go.id Website : sidoarjokab.go.id 8 I D O A R J O



ra
Renst
Review
rosedur I
Jraian F

			Pelaksana			Mutu Buku		***************************************
No	Uraian	Camat	Sekretaris	Pejabat/Staf Perencanaan	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
-	Memerintahkan untuk melakukan review	Mulai			Capaian Kinerja	1 hari	Usulan	Review dilaksanakan tiap tahun pada tribulan I
2	terbadap kinerja Membuat Draft Konsep Usulan Perubahan				Konsep Usulan	1 hari	Draft/Format	
6	Menghimpun dan menyampaikan usulan/konsep serta masukan			→	Draft/Format	2 hari	Usulan Perubahan	
4	Menganalisa, membahas, membuat draft hasil perubahan dan menyerahkan ke Sekretaris		Ya		Usulan Perubahan	3 hari	Draft Hasil Perubahan	
	Carnat	Vo						
ıń	Meneliti draft hasil perubahan, jika setuju memparaf dan menyampaikannya kepada Camat, jika tidak setuju mengembalikan	Ia	*	Tidak	Draft Hasil Perubahan	2 hari	Berita Acara Hasil Perubahan	
	Repada Kasubag Perencanaan	 			Berita Acara Hasil	,	F.	
9		\Diamond	Tidak		Perubahan	ı narı	reporan	
7				Selesai	Laporan	1 hari	Dokumen Renstra Perubahan	

